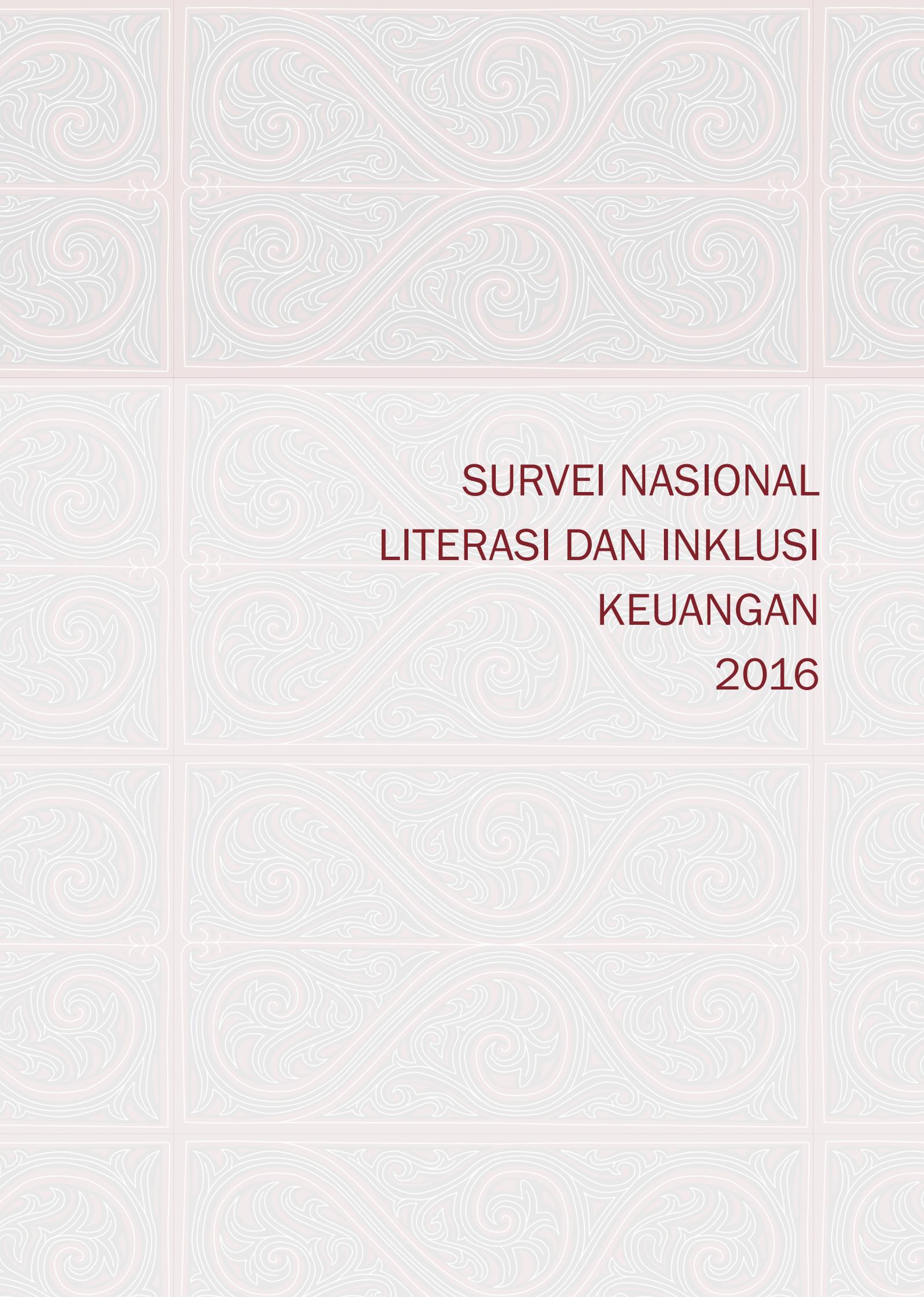




OTORITAS
JASA
KEUANGAN

SURVEI NASIONAL LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN 2016

Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan
Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen



**SURVEI NASIONAL
LITERASI DAN INKLUSI
KEUANGAN
2016**

Kata Pengantar

Dalam era globalisasi dan kondisi ekonomi yang dinamis, Pemerintah perlu mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk mendorong masyarakat terlibat dalam pembangunan ekonomi termasuk di sektor keuangan. Keterlibatan masyarakat dalam sektor keuangan tersebut dapat diwujudkan dalam kondisi ketika setiap anggota masyarakat memiliki akses untuk memanfaatkan berbagai layanan keuangan formal yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka mencapai kesejahteraan yang sering disebut dengan keuangan inklusif.

Dilihat dari perspektif ekonomi makro, inklusi keuangan memiliki dampak yang positif terhadap perekonomian suatu negara dan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antar individu dan antardaerah. Dengan tersedianya akses terhadap layanan keuangan, masyarakat dapat memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan dan membuka jalan untuk keluar dari kemiskinan serta mengurangi kesenjangan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi juga perlu ditopang oleh tingkat literasi keuangan masyarakat. Masyarakat yang *well literate* (melek keuangan) lebih mudah memahami dan mengerti mengenai seluk-beluk sektor jasa keuangan yang pada akhirnya akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan serta dapat melindungi diri dari potensi kerugian akibat kejahatan di sektor keuangan. Hal ini sejalan dengan trilogi pemberdayaan konsumen yang menunjukkan adanya hubungan antara literasi keuangan, inklusi keuangan dan perlindungan konsumen.

Upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan telah menjadi isu global. Saat ini berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang telah mulai merumuskan strategi dan kebijakan dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat dalam berinteraksi dengan industri jasa keuangan. Dalam melindungi kepentingan masyarakat, terdapat aspek literasi dan inklusi keuangan yang memerlukan strategi kebijakan tersendiri dalam implementasinya. Untuk menciptakan strategi kebijakan yang tepat sasaran, efektif dan efisien, diperlukan data mengenai kondisi terkini literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Oleh karena itu, OJK menyelenggarakan survei berskala nasional yang disebut sebagai Survei Nasional Literasi Keuangan 2013 dan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016 untuk mengetahui kondisi terkini literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh OJK tahun 2013 dan 2016 tersebut, tingkat literasi keuangan Indonesia mengalami peningkatan dari yang sebelumnya sebesar 21,8% tahun 2013 menjadi 29,7% di tahun 2016. Demikian pula pada tingkat inklusi keuangan Indonesia yang sebelumnya adalah 59,7% pada tahun 2013 meningkat menjadi 67,8% di tahun 2016.

Data survei dimaksud akan digunakan oleh OJK sebagai materi dasar dalam penyusunan dan penyempurnaan strategi kebijakan dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang tertuang dalam Strategi Nasional Literasi dan



Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh OJK tahun 2013 dan 2016 tersebut, tingkat literasi keuangan Indonesia mengalami peningkatan dari yang sebelumnya sebesar 21,8% tahun 2013 menjadi 29,7% di tahun 2016. Demikian pula pada tingkat inklusi keuangan Indonesia yang sebelumnya adalah 59,7% di tahun 2013 meningkat menjadi 67,8% di tahun 2016.

Keuangan Inklusi. Tidak hanya bagi OJK, strategi tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam penyusunan program-program dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

Lebih lanjut, survei tersebut juga diperlukan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi program literasi dan inklusi keuangan yang telah diupayakan bersama baik dari OJK maupun industri jasa keuangan. Data hasil SNLIK 2016 tersebut akan menjadi masukan yang berharga bagi OJK maupun Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam menentukan kegiatan edukasi serta inovasi produk atau layanan jasa keuangan ditengah keadaan industri jasa keuangan yang mengalami perubahan yang dinamis dan terus bergerak maju. Sementara bagi masyarakat umum, data hasil SNLIK 2016 juga diharapkan dapat diakses oleh insan akademik di jenjang pendidikan tinggi untuk digunakan sebagai bahan baku riset yang memperkaya khazanah keilmuan di bidang literasi dan inklusi keuangan.

Untuk mempermudah akses, laporan statistik ini bisa dibaca dan diunduh melalui website [sikapiuangmu \(sikapiuangmu.ojk.go.id\)](http://sikapiuangmu.sikapiuangmu.ojk.go.id). Laporan

Statistik ini dapat terwujud berkat kerja sama dan partisipasi dari berbagai pihak. Semoga laporan yang disajikan bermanfaat bagi pengguna untuk berbagai keperluan. Kami mengharapkan tanggapan dan saran dari para pengguna untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, Oktober 2017
Anggota Dewan Komisioner Bidang
Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Otoritas Jasa Keuangan

Tirta Segara

DAFTAR ISI

ii	KATA PENGANTAR
iv	DAFTAR ISI
v	DAFTAR TABEL
viii	PENJELASAN UMUM
1	BAB I INDEKS LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN
4	BAB II RINCIAN INDEKS LITERASI KEUANGAN
11	BAB III RINCIAN INDEKS INKLUSI KEUANGAN
20	BAB IV PEMETAAN LITERASI KEUANGAN TAHUN 2016
31	BAB V PEMETAAN INKLUSI KEUANGAN TAHUN 2016
37	BAB VI PERTANYAAN PENDUKUNG (OECD)

DAFTAR TABEL

1.1	PROPORSI RESPONDEN	12
	Tabel 1.1.1 Proporsi Responden Berdasarkan Gender	12
	Tabel 1.1.2 Proporsi Responden Berdasarkan Strata Wilayah	12
	Tabel 1.1.3 Proporsi Responden Berdasarkan Pekerjaan	12
	Tabel 1.1.4 Proporsi Responden Berdasarkan Kelompok Usia	12
	Tabel 1.1.5 Proporsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	13
	Tabel 1.1.6 Proporsi Responden Berdasarkan Tingkat Pengeluaran	13
1.2	INDEKS LITERASI DAN INKLUSI NASIONAL	13
	Tabel 1.2.1 Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional Tahun 2013-2016	13
1.3	INDEKS LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN SEKTORAL 2013-2016	14
	Tabel 1.3.1 Indeks Literasi Keuangan Sektoral 2013-2016	14
	Tabel 1.3.2 Indeks Inklusi Keuangan Sektoral 2013-2016	14
2.1	INDEKS LITERASI KEUANGAN BERDASARKAN KLASSTER RESPONDEN	16
	Tabel 2.1.1 Indeks Literasi Keuangan Tahun 2016 Berdasarkan Gender	16
	Tabel 2.1.2 Indeks Literasi Keuangan Tahun 2016 Berdasarkan Strata Wilayah	16
	Tabel 2.1.3 Indeks Literasi Keuangan Tahun 2016 Berdasarkan Pekerjaan	16
	Tabel 2.1.4 Indeks Literasi Keuangan Tahun 2016 Berdasarkan Usia	16
	Tabel 2.1.5 Indeks Literasi Keuangan Tahun 2016 Berdasarkan Tingkat Pendidikan	17
	Tabel 2.1.6 Indeks Literasi Keuangan Tahun 2016 Berdasarkan Tingkat Pengeluaran	17
2.2	INDEKS LITERASI PER PROVINSI	18
	Tabel 2.2.1 Indeks Literasi Keuangan Tahun 2016 per Provinsi	18
	Tabel 2.2.2 Indeks Literasi Keuangan Tahun 2016 per Provinsi berdasarkan Gender	19

DAFTAR TABEL

	Tabel 2.2.3 Indeks Literasi Keuangan Tahun 2016 per Provinsi berdasarkan Strata Wilayah	20
	Tabel 2.2.4 Indeks Literasi Keuangan Tahun 2016 per Provinsi berdasarkan Tingkat Pengeluaran	21
3.1	INDEKS INKLUSI KEUANGAN BERDASARKAN KLASSTER RESPONDEN	24
	Tabel 3.1.1 Indeks Inklusi Keuangan Tahun 2016 Berdasarkan Gender	24
	Tabel 3.1.2 Indeks Inklusi Keuangan Tahun 2016 Berdasarkan Strata Wilayah	24
	Tabel 3.1.3 Indeks Inklusi Keuangan Tahun 2016 Berdasarkan Pekerjaan	24
	Tabel 3.1.4 Indeks Inklusi Keuangan Tahun 2016 Berdasarkan Usia	24
	Tabel 3.1.5 Indeks Inklusi Keuangan Tahun 2016 Berdasarkan Tingkat Pendidikan	25
	Tabel 3.1.6 Indeks Inklusi Keuangan Tahun 2016 Berdasarkan Tingkat Pengeluaran	25
3.2	INDEKS INKLUSI PER PROVINSI	26
	Tabel 3.2.1 Indeks Inklusi Keuangan Tahun 2016 per Provinsi	26
	Tabel 3.2.2 Indeks Inklusi Keuangan Tahun 2016 per Provinsi berdasarkan Gender	26
	Tabel 3.2.3 Indeks Inklusi Keuangan Tahun 2016 per Provinsi berdasarkan Strata Wilayah	27
	Tabel 3.2.4 Indeks Inklusi Keuangan Tahun 2016 per Provinsi berdasarkan Tingkat Pengeluaran	29
	Tabel 3.2.5 Popularitas Produk dan Layanan Jasa Keuangan per Provinsi Tahun 2016	30
4.1	LEMBAGA JASA KEUANGAN FORMAL	33
	Tabel 4.1.2 Keyakinan terhadap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Formal	33

DAFTAR TABEL

	Tabel 4.1.3 Alasan Meyakini LJK Konvensional	35
	Tabel 4.1.4 Alasan Meyakini LJK Syariah	35
4.2	PRODUK DAN LAYANAN JASA KEUANGAN FORMAL	36
	Tabel 4.2.1 Pengetahuan tentang Produk dan Layanan Perbankan	36
	Tabel 4.2.2 Pengetahuan tentang Produk dan Layanan Perasuransian	36
	Tabel 4.2.3 Pengetahuan tentang Produk dan Layanan Lembaga Pembiayaan	37
	Tabel 4.2.4 Pengetahuan tentang Produk dan Layanan Dana Pensiun	38
	Tabel 4.2.5 Pengetahuan tentang Produk dan Layanan Pergadaian	38
	Tabel 4.2.6 Pengetahuan tentang Produk dan Layanan Pasar Modal	38
	Tabel 4.2.7 Pengetahuan tentang Produk dan Layanan BPJS	39
	Tabel 4.2.8 Pengetahuan tentang Produk dan Layanan LJK Formal Lainnya	39
	Tabel 4.2.9 Pengetahuan terhadap Karakteristik Produk	39
4.3	KEMAMPUAN KEUANGAN	39
	Tabel 4.3.1 Pernyataan Kemampuan Berhitung	39
	Tabel 4.3.2 Kemampuan Menghitung	40
4.4	INFORMASI KEUANGAN	40
	Tabel 4.4.1 Sumber Informasi Keuangan	40
	Tabel 4.4.2 Sumber Konsultansi Keuangan	41
4.5	PENGELOLAAN KEUANGAN	41
	Tabel 4.5.1 Tujuan Keuangan	41
	Tabel 4.5.2 Upaya Mencapai Tujuan Keuangan	41

DAFTAR TABEL

4.6	PENGANGGARAN KEUANGAN	42
	Tabel 4.6.1 Penyusunan Anggaran	42
	Tabel 4.6.2 Komitmen Pelaksanaan Anggaran	42
	Tabel 4.6.3 Preferensi Produk saat Uang Berlebih	42
4.7	KETAHANAN KEUANGAN	42
	Tabel 4.7.1 Cara yang dilakukan untuk Memenuhi Kebutuhan di Hari Tua	42
	Tabel 4.7.2 Ketahanan Keuangan Apabila Kekurangan Pendapatan/ Pengeluaran Besar Secara Tiba-tiba	43
	Tabel 4.7.3 Upaya Yang Dilakukan Apabila Kehilangan Pekerjaan	43
	Tabel 4.7.3 Upaya Yang Dilakukan Apabila Kehilangan Pekerjaan	43
	Tabel 4.7.4 Keyakinan terhadap Kemampuan Keuangan	43
5.1	PENGUNAAN PRODUK DAN LAYANAN JASA KEUANGAN FORMAL 1 TAHUN TERAKHIR	45
	Tabel 5.1.1 Penggunaan Produk dan Layanan Perbankan 1 Tahun Terakhir	45
	Tabel 5.1.2 Penggunaan Produk dan Layanan Perasuransian 1 Tahun Terakhir	46
	Tabel 5.1.3 Penggunaan Produk dan Layanan Lembaga Pembiayaan 1 Tahun Terakhir	47
	Tabel 5.1.4 Penggunaan Produk dan Layanan Dana Pensiun 1 Tahun Terakhir	47
	Tabel 5.1.5 Penggunaan Produk dan Layanan Pergadaian 1 Tahun Terakhir	47
	Tabel 5.1.6 Penggunaan Produk dan Layanan Pasar Modal 1 Tahun Terakhir	48
	Tabel 5.1.7 Penggunaan Produk dan Layanan BPJS 1 Tahun Terakhir	48
	Tabel 5.1.8 Penggunaan Produk dan Layanan LJK Lainnya 1 Tahun Terakhir	48

DAFTAR TABEL

5.2	TUJUAN MENGGUNAKAN PRODUK	48
	Tabel 5.2.1 Tujuan Menggunakan Produk	48
5.3	FREKUENSI PENGGUNAAN PRODUK DAN LAYANAN JASA KEUANGAN	49
	Tabel 5.3.1 Frekuensi Penggunaan Produk dan Layanan Jasa Keuangan	49
5.4	DELIVERY CHANNEL	50
	Tabel 5.4.1 Pengetahuan <i>Delivery Channel</i>	50
	Tabel 5.4.2 Penggunaan <i>Delivery Channel</i>	50
	Tabel 5.4.3 Penggunaan <i>Delivery Channel</i> Berdasarkan Produk dan Layanan Jasa Keuangan	50
	Tabel 5.4.4 Frekuensi Penggunaan <i>Delivery Channel</i>	51
	Tabel 6.1 Kegiatan Menabung dalam 1 Tahun Terakhir	53
	Tabel 6.2 Media Pembayaran yang Paling Sering Digunakan	54
	Tabel 6.3 Kemampuan Menghitung (tambahan)	54
	Tabel 6.4 Pemahaman Keuangan	55
	Tabel 6.5 Pernyataan yang paling menunjukkan Cara Pengambilan Keputusan	55
	Tabel 6.6 Pengalaman dalam 2 Tahun Terakhir	55
	Tabel 6.7 Mengambil Keputusan Keuangan Sehari-hari	56
	Tabel 6.8 Pengalaman terkait Ketahanan Keuangan	56
	Tabel 6.9 Jangka Waktu Ketahanan Keuangan	56
	Tabel 6.10 Pernyataan Sikap Keuangan	57

PENJELASAN UMUM

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2016 (SNLIK 2016) merupakan survei berskala nasional yang diselenggarakan untuk memetakan keadaan terkini literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. SNLIK 2016 merupakan kelanjutan dari Survei Nasional Literasi Keuangan pada tahun 2013 (SNLK 2013) yang dilakukan terhadap 8.000 responden yang tersebar di 40 Kabupaten/Kota di 20 provinsi. Pada tahun 2016, SNLIK dilakukan dengan jumlah responden yang lebih banyak dan sebaran wilayah yang lebih luas yaitu 9.680 responden di 34 Provinsi yang tersebar di 64 Kabupaten/Kota. Sebaran sampel tersebut ditentukan berdasarkan metode *multi stage stratified random sampling* berdasarkan klasifikasi responden yang dikelompokkan ke dalam kelompok strata wilayah, kelompok strata sosial, kelompok jenis kelamin, kelompok pekerjaan, kelompok usia dan kelompok tingkat pendidikan.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada responden dengan kuesioner yang telah didesain sebelumnya. Kuesioner SNLIK 2016 disusun dengan mengacu pada kuesioner SNLK 2013 dengan tambahan dan modifikasi dari beberapa pertanyaan yang diadaptasi dari *Financial Capability Survey (2013)* dan *Global Financial Inclusion Index (2014)* dilaksanakan oleh World Bank dan 2015 *OECD/INFE Toolkit for Measuring Financial Literacy and Financial Inclusion* yang dilaksanakan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Hal – hal yang baru dalam SNLIK 2016 adalah adanya analisis aspek syariah

serta penambahan indikator pembentuk Indeks Literasi Keuangan, yaitu sikap dan perilaku selain pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan sebagai upaya peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan individu. Buku ini terdiri dari 2 bagian besar yaitu informasi tentang indeks literasi dan inklusi keuangan, serta informasi terkait pemetaan literasi dan inklusi yang berasal dari jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan yang tersusun dalam kuesioner SNLIK 2016. Selain itu, terdapat 1 bagian tambahan yang memuat informasi terkait dengan literasi keuangan yang diacu dari kuesioner dan metodologi survei yang dilakukan oleh OECD.

Dalam mengukur indeks literasi, terdapat aspek pengenalan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan lembaga jasa keuangan dikelompokkan kedalam 6 sektor jasa keuangan yaitu perbankan, perasuransian, lembaga pembiayaan (perusahaan pembiayaan dan modal ventura), pasar modal (perusahaan efek dan manajer investasi), pergadaian dan dana pensiun. Demikian halnya dalam mengukur indeks inklusi keuangan, masyarakat yang dikatakan inklusif secara keuangan adalah masyarakat yang menggunakan produk dan layanan jasa keuangan dalam kurun waktu 12 bulan terakhir dihitung dari waktu pelaksanaan survei. Dalam survei ini, terdapat 40 pilihan produk dan layanan jasa keuangan yang dikeluarkan oleh lembaga jasa keuangan dari 6 sektor sebagaimana disebutkan sebelumnya.

BAB I

**INDEKS
LITERASI
DAN INKLUSI
KEUANGAN**

INDEKS LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN

BAB 1

1.1. Proporsi Responden

Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan selain secara nasional dapat pula dijabarkan berdasarkan klaster responden. Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan berdasarkan klaster responden merupakan gambaran tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat pada masing-masing klasifikasi masyarakat. Dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2016, responden diklasifikasikan ke dalam 6 (enam) klaster yaitu berdasarkan jenis kelamin, strata wilayah, pekerjaan, usia, tingkat pendidikan dan tingkat pengeluaran.

Adapun teknis pengukuran indeks literasi keuangan adalah hasil perbandingan jumlah masyarakat yang memiliki tingkat literasi yang baik (*well literate*) dengan total jumlah responden pada masing-masing klaster. Demikian pula halnya indeks inklusi keuangan adalah perbandingan jumlah masyarakat yang menggunakan produk dan layanan jasa keuangan dengan total jumlah responden pada masing-masing klaster. Untuk itu pada subbab ini dijabarkan proporsi responden berdasarkan masing-masing klaster responden.

Tabel 1.1.1 Proporsi Responden Berdasarkan Gender

Keterangan	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	4.907	50,7%
Perempuan	4.773	49,3%
Jumlah	9.680	100%

Tabel 1.1.2 Proporsi Responden Berdasarkan Strata Wilayah

Keterangan	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Perkotaan	5.738	59,3%
Perdesaan	3.942	40,7%
Jumlah	9.680	100,0%

Tabel 1.1.3 Proporsi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Keterangan	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Pengusaha	2.885	29,8%
Pegawai dan Profesional	3.693	38,2%
Pelajar/Mahasiswa	642	6,6%
Ibu Rumah Tangga	2.064	21,3%
Pensiunan	150	1,5%
Tidak Bekerja dan Lainnya	246	2,5%
Jumlah	9.680	100%

Tabel 1.1.4 Proporsi Responden Berdasarkan Kelompok Usia

Keterangan	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
15-17 Tahun	134	1,4%
18-25 Tahun	1.451	15,0%
26-35 Tahun	2.418	25,0%
36-50 Tahun	3.810	39,4%
di atas 50 Tahun	1.867	19,3%
Jumlah	9.680	100%

Tabel 1.1.5 Proporsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Keterangan	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Tidak Bersekolah/Tidak Tamat SD	308	3,2%
Lulus SD	1.961	20,3%
Lulus SMP	1.986	20,5%
Lulus SMA	4.180	43,2%
Perguruan Tinggi	1.245	12,9%
Jumlah	9.680	100%

Tabel 1.1.6 Proporsi Responden Berdasarkan Tingkat Pengeluaran

Keterangan	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Pengeluaran A	1.041	10,8%
Pengeluaran B	1.798	18,6%
Pengeluaran C	3.635	37,6%
Pengeluaran D	2.252	23,3%
Pengeluaran E	943	9,7%
Jumlah	9.680	100%

Catatan :

Pengeluaran A : Pengeluaran per bulan di atas Rp1.750.000,-

Pengeluaran B : Pengeluaran per bulan antara Rp1.250.001,- sd Rp1.750.000,-

Pengeluaran C : Pengeluaran per bulan antara Rp600.001,- sd Rp1.250.000,-

Pengeluaran D : Pengeluaran per bulan antara Rp400.000,- sd Rp600.000,-

Pengeluaran E : Pengeluaran per bulan di bawah Rp400.000,-

1.2. Indeks Literasi dan Inklusi Nasional

Tabel 1.2.1 Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional Tahun 2013-2016

Keterangan	2013	2016		
		Komposit	Konvensional	Syariah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indeks Literasi Keuangan	21,8%	29,7%	29,5%	8,1%
Indeks Inklusi Keuangan	59,7%	67,8%	65,6%	11,1%

1.3. Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Sektoral 2013-2016

Tabel 1.3.1 Indeks Literasi Keuangan Sektoral 2013-2016

No	Sektor	Indeks Literasi Keuangan 2013	Indeks Literasi Keuangan 2016		
			Komposit	Konvensional	Syariah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perbankan	21,8%	28,9%	28,3%	6,6%
2	Perasuransian	17,8%	15,8%	15,7%	2,5%
3	Dana Pensiun	7,1%	10,9%	10,9%	0,0%
4	Lembaga Pembiayaan	9,8%	13,0%	12,8%	0,2%
5	Pergadaian	14,9%	17,8%	17,1%	1,6%
6	Pasar Modal	3,8%	4,4%	4,4%	0,02%

Tabel 1.3.2 Indeks Inklusi Keuangan Sektoral 2013-2016

No	Sektor	Indeks Inklusi Keuangan 2013	Indeks Inklusi Keuangan 2016		
			Komposit	Konvensional	Syariah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perbankan	57,3%	63,6%	60,7%	9,6%
2	Perasuransian	11,8%	12,1%	11,8%	1,9%
3	Dana Pensiun	1,5%	4,7%	4,7%	0,0%
4	Lembaga Pembiayaan	6,3%	11,8%	11,8%	0,2%
5	Pergadaian	5,0%	10,5%	9,8%	0,7%
6	Pasar Modal	0,1%	1,3%	1,3%	0,01%



BAB II

RINCIAN INDEKS LITERASI KEUANGAN

RINCIAN INDEKS LITERASI KEUANGAN

BAB II

2.1. Indeks Literasi Keuangan Berdasarkan Klaster Responden

Tabel 2.1.1 Indeks Literasi Keuangan Tahun 2016 Berdasarkan Gender

No	Klaster	Indeks Literasi Keuangan		
		Komposit	Konvensional	Syariah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Laki-Laki	33.2%	33.0%	8.6%
2	Perempuan	25.5%	25.5%	7.3%

Tabel 2.1.2 Indeks Literasi Keuangan Tahun 2016 Berdasarkan Strata Wilayah

No	Klaster	Indeks Literasi Keuangan		
		Komposit	Konvensional	Syariah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perkotaan	33.2%	33.1%	10.1%
2	Perdesaan	23.9%	23.8%	4.8%

Tabel 2.1.3 Indeks Literasi Keuangan Tahun 2016 Berdasarkan Pekerjaan

No	Klaster	Indeks Literasi Keuangan		
		Komposit	Konvensional	Syariah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengusaha	27,7%	27.6%	6.7%
2	Pegawai dan Profesional	39,9%	39.8%	12.4%
3	Pelajar/Mahasiswa	23,4%	23.2%	5.3%
4	Ibu Rumah Tangga	15,3%	15.2%	3.0%
5	Pensiunan	35,3%	35.3%	9.3%
6	Tidak Bekerja dan Lainnya	22,8%	22.8%	3.7%

Tabel 2.1.4 Indeks Literasi Keuangan Tahun 2016 Berdasarkan Usia

No	Klaster	Indeks Literasi Keuangan		
		Komposit	Konvensional	Syariah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	15-17 Tahun	5,2%	5.2%	2.2%
2	18-25 Tahun	32,1%	32.0%	8.1%
3	26-35 Tahun	33,5%	33.3%	9.3%
4	36-50 Tahun	30,6%	30.4%	8.7%
5	di atas 50 Tahun	21,4%	21.3%	4.9%

Tabel 2.1.5 Indeks Literasi Keuangan Tahun 2016 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Klaster	Indeks Literasi Keuangan		
		Komposit	Konvensional	Syariah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tidak Bersekolah/Tidak Tamat SD	3,6%	3,6%	0,6%
2	Lulus SD	9,0%	9,0%	0,7%
3	Lulus SMP	11,3%	11,3%	2,5%
4	Lulus SMA	38,2%	38,0%	7,5%
5	Perguruan Tinggi	67,4%	67,1%	31,5%

Tabel 2.1.6 Indeks Literasi Keuangan Tahun 2016 Berdasarkan Tingkat Pengeluaran

No	Klaster	Indeks Literasi Keuangan		
		Komposit	Konvensional	Syariah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengeluaran A	50,4%	50,3%	18,4%
2	Pengeluaran B	38,2%	38,2%	12,5%
3	Pengeluaran C	29,3%	29,1%	6,6%
4	Pengeluaran D	18,7%	18,6%	3,8%
5	Pengeluaran E	15,4%	15,3%	2,8%

Catatan :

Pengeluaran A : Pengeluaran per bulan di atas Rp1.750.000,-

Pengeluaran B : Pengeluaran per bulan antara Rp1.250.001,- sd Rp1.750.000,-

Pengeluaran C : Pengeluaran per bulan antara Rp600.001,- sd Rp1.250.000,-

Pengeluaran D : Pengeluaran per bulan antara Rp400.000,- sd Rp600.000,-

Pengeluaran E : Pengeluaran per bulan di bawah Rp400.000,-

2.2. Indeks Literasi per Provinsi

Tabel 2.2.1 Indeks Literasi Keuangan Tahun 2016 per Provinsi

No	Provinsi	Indeks Literasi Keuangan		
		Komposit	Konvensional	Syariah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	32,7%	32,7%	21,1%
2	Sumatera Utara	31,3%	31,3%	5,5%
3	Sumatera Barat	27,3%	27,3%	11,6%
4	Riau	29,5%	29,5%	8,7%
5	Jambi	26,9%	26,9%	12,7%
6	Sumatera Selatan	31,3%	31,3%	8,4%
7	Bengkulu	27,6%	27,6%	7,3%
8	Bangka Belitung	29,5%	29,5%	5,5%
9	Lampung	26,9%	26,5%	6,5%
10	Kepulauan Riau	37,1%	37,1%	9,8%
11	DKI Jakarta	40,0%	39,6%	16,4%
12	Jawa Barat	33,0%	33,0%	4,7%
13	Jawa Tengah	33,5%	33,5%	11,2%
14	DI Yogyakarta	38,5%	38,5%	9,5%
15	Jawa Timur	35,6%	35,3%	29,4%
16	Banten	38,2%	38,2%	7,3%
17	Bali	37,5%	37,5%	1,1%
18	Nusa Tenggara Barat	21,5%	20,7%	5,1%
19	Nusa Tenggara Timur	28,0%	28,0%	0,0%
20	Kalimantan Barat	30,5%	30,5%	3,6%
21	Kalimantan Tengah	26,2%	25,8%	2,9%
22	Kalimantan Selatan	23,3%	23,3%	6,5%
23	Kalimantan Timur	30,5%	30,5%	3,6%
24	Kalimantan Utara	26,5%	26,5%	5,1%
25	Sulawesi Utara	28,7%	28,7%	4,0%
26	Sulawesi Tengah	22,5%	22,5%	9,5%
27	Sulawesi Selatan	28,4%	28,4%	6,2%
28	Sulawesi Tenggara	26,5%	26,5%	9,5%
29	Gorontalo	23,3%	22,9%	7,6%
30	Sulawesi Barat	26,9%	26,9%	2,5%
31	Maluku	26,2%	26,2%	2,9%
32	Maluku Utara	27,3%	25,8%	12,7%
33	Papua Barat	19,3%	19,3%	2,2%
34	Papua	22,2%	22,2%	1,1%

Tabel 2.2.2 Indeks Literasi Keuangan Tahun 2016 per Provinsi berdasarkan Gender

No	Provinsi	Indeks Literasi Keuangan	
		Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aceh	39,0%	26,6%
2	Sumatera Utara	37,9%	24,4%
3	Sumatera Barat	33,6%	21,0%
4	Riau	35,7%	23,0%
5	Jambi	29,0%	24,8%
6	Sumatera Selatan	35,8%	26,8%
7	Bengkulu	31,9%	23,4%
8	Bangka Belitung	33,3%	25,5%
9	Lampung	32,4%	21,3%
10	Kepulauan Riau	43,4%	30,0%
11	DKI Jakarta	44,8%	34,8%
12	Jawa Barat	34,6%	32,0%
13	Jawa Tengah	36,9%	29,9%
14	DI Yogyakarta	41,5%	35,3%
15	Jawa Timur	38,9%	32,3%
16	Banten	47,5%	28,4%
17	Bali	49,6%	25,0%
18	Nusa Tenggara Barat	25,4%	17,3%
19	Nusa Tenggara Timur	27,5%	28,5%
20	Kalimantan Barat	31,9%	29,2%
21	Kalimantan Tengah	33,3%	19,0%
22	Kalimantan Selatan	23,0%	23,5%
23	Kalimantan Timur	34,3%	26,7%
24	Kalimantan Utara	34,1%	19,0%
25	Sulawesi Utara	29,4%	28,1%
26	Sulawesi Tengah	28,8%	15,5%
27	Sulawesi Selatan	31,2%	25,5%
28	Sulawesi Tenggara	31,0%	21,8%
29	Gorontalo	20,3%	26,5%
30	Sulawesi Barat	27,7%	26,1%
31	Maluku	25,4%	27,1%
32	Maluku Utara	32,8%	21,7%
33	Papua Barat	19,4%	19,1%
34	Papua	21,7%	22,6%

Tabel 2.2.3 Indeks Literasi Keuangan Tahun 2016 per Provinsi berdasarkan Strata Wilayah

No	Nama Provinsi	Nama Kota/Kabupaten	Indeks Literasi Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aceh	Banda Aceh	40,4%
		Pidie	25,2%
2	Sumatera Utara	Medan	35,5%
		Toba Samosir	27,0%
3	Sumatera Barat	Padang	34,3%
		Padang Pariaman	20,3%
4	Riau	Pekanbaru	43,1%
		Indragiri Hilir	15,9%
5	Jambi	Jambi	33,6%
		Sorolangun	20,3%
6	Sumatera Selatan	Palembang	34,8%
		Muara Enim	27,7%
7	Bengkulu	Bengkulu	35,3%
		Kepahiang	19,9%
8	Bangka Belitung	Pangkal Pinang	29,5%
9	Lampung	Bandar Lampung	27,5%
		Lampung Barat	26,3%
10	Kepulauan Riau	Batam	37,1%
11	DKI Jakarta	Jakarta Selatan	58,4%
		Kepulauan Seribu	21,7%
12	Jawa Barat	Bandung	49,2%
		Cirebon	18,7%
		Tasikmalaya	30,0%
13	Jawa Tengah	Semarang	44,1%
		Solo	34,9%
		Banyumas	21,7%
14	DI Yogyakarta	Yogyakarta	44,5%
		Sleman	32,6%
15	Jawa Timur	Surabaya	45,9%
		Malang	33,9%
		Jember	26,6%
16	Banten	Tangerang	40,9%
		Serang	35,5%
17	Bali	Denpasar	42,9%
		Buleleng	32,4%
18	Nusa Tenggara Barat	Mataram	21,9%
		Lombok Timur	21,0%
19	Nusa Tenggara Timur	Kupang	26,3%
		Flores Timur	29,7%

Lanjutan Tabel 2.2.3

No	Nama Provinsi	Nama Kota/Kabupaten	Indeks Literasi Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)
20	Kalimantan Barat	Pontianak	40,1%
		Landak	21,0%
21	Kalimantan Tengah	Palangkaraya	27,0%
		Barito Selatan	25,4%
22	Kalimantan Selatan	Banjarmasin	26,3%
		Hulu Tengah Sungai	20,3%
23	Kalimantan Timur	Samarinda	40,9%
		Kutai Timur	20,3%
24	Kalimantan Utara	Tanjung Selor	26,5%
25	Sulawesi Utara	Manado	32,8%
		Bolaang Mongondow Utara	24,6%
26	Sulawesi Tengah	Palu	29,0%
		Donggala	16,1%
27	Sulawesi Selatan	Makassar	37,2%
		Luwu Timur	19,6%
28	Sulawesi Tenggara	Kendari	35,5%
		Kolaka Utara	17,5%
29	Gorontalo	Gorontalo	23,3%
30	Sulawesi Barat	Mamuju	26,9%
31	Maluku	Ambon	28,3%
		Buru Selatan	24,1%
32	Maluku Utara	Ternate	27,3%
33	Papua Barat	Manokwari	19,3%
34	Papua	Jayapura	26,8%
		Mimika	17,5%

Tabel 2.2.4 Indeks Literasi Keuangan Tahun 2016 per Provinsi berdasarkan Tingkat Pengeluaran

No	Provinsi	Indeks Literasi Keuangan				
		Pengeluaran A	Pengeluaran B	Pengeluaran C	Pengeluaran D	Pengeluaran E
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	41,9%	42,3%	32,7%	26,1%	20,0%
2	Sumatera Utara	36,4%	46,0%	31,5%	21,7%	5,3%
3	Sumatera Barat	30,3%	36,0%	30,7%	15,2%	5,3%
4	Riau	41,7%	31,7%	30,0%	23,5%	23,3%
5	Jambi	57,1%	43,8%	26,4%	9,9%	5,6%
6	Sumatera Selatan	42,3%	45,5%	29,3%	23,6%	22,5%
7	Bengkulu	54,5%	40,9%	20,5%	26,3%	14,3%
8	Bangka Belitung	51,9%	39,3%	20,4%	26,2%	26,7%
9	Lampung	68,4%	29,0%	36,3%	11,1%	14,3%
10	Kepulauan Riau	38,9%	52,2%	34,5%	11,1%	0,0%

Lanjutan Tabel 2.2.4

No	Provinsi	Indeks Literasi Keuangan				
		Pengeluaran A	Pengeluaran B	Pengeluaran C	Pengeluaran D	Pengeluaran E
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	DKI Jakarta	69,0%	35,9%	38,8%	27,1%	28,6%
12	Jawa Barat	48,0%	48,2%	41,7%	18,1%	24,3%
13	Jawa Tengah	70,6%	51,3%	30,2%	9,7%	9,1%
14	DI Yogyakarta	65,6%	44,9%	37,9%	30,0%	25,5%
15	Jawa Timur	62,5%	45,9%	42,3%	18,6%	11,4%
16	Banten	34,1%	51,2%	40,7%	24,4%	25,0%
17	Bali	58,8%	30,0%	36,0%	23,1%	20,0%
18	Nusa Tenggara Barat	47,8%	17,5%	19,9%	20,8%	0,0%
19	Nusa Tenggara Timur	69,2%	51,4%	34,2%	18,2%	7,0%
20	Kalimantan Barat	59,3%	27,8%	31,1%	18,8%	37,5%
21	Kalimantan Tengah	61,9%	33,3%	20,0%	15,3%	0,0%
22	Kalimantan Selatan	51,7%	24,0%	32,5%	9,0%	8,6%
23	Kalimantan Timur	47,1%	36,2%	23,9%	31,0%	16,7%
24	Kalimantan Utara	55,2%	42,3%	21,9%	14,9%	12,9%
25	Sulawesi Utara	66,7%	35,0%	29,6%	14,8%	27,8%
26	Sulawesi Tengah	60,0%	31,6%	17,6%	14,6%	5,0%
27	Sulawesi Selatan	59,3%	35,8%	21,2%	29,7%	8,3%
28	Sulawesi Tenggara	38,7%	21,3%	36,4%	16,4%	4,3%
29	Gorontalo	36,6%	33,3%	23,1%	15,6%	7,7%
30	Sulawesi Barat	29,4%	34,9%	36,8%	8,8%	11,1%
31	Maluku	52,2%	43,6%	19,8%	18,4%	15,0%
32	Maluku Utara	42,9%	35,1%	19,3%	23,5%	32,3%
33	Papua Barat	40,0%	24,5%	20,0%	10,2%	11,1%
34	Papua	27,3%	40,7%	13,3%	18,8%	26,1%

Catatan :

Pengeluaran A : Pengeluaran per bulan di atas Rp1.750.000,-

Pengeluaran B : Pengeluaran per bulan antara Rp1.250.001,- sd Rp1.750.000,-

Pengeluaran C : Pengeluaran per bulan antara Rp600.001,- sd Rp1.250.000,-

Pengeluaran D : Pengeluaran per bulan antara Rp400.000,- sd Rp600.000,-

Pengeluaran E : Pengeluaran per bulan di bawah Rp400.000,-

BAB III

**RINCIAN
INDEKS
INKLUSI
KEUANGAN**

RINCIAN INDEKS INKLUSI KEUANGAN

BAB III

3.1. Indeks Inklusi Keuangan Berdasarkan Klaster Responden

Tabel 3.1.1 Indeks Inklusi Keuangan Tahun 2016 Berdasarkan Gender

No	Klaster	Indeks Inklusi Keuangan		
		Komposit	Konvensional	Syariah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Laki-Laki	69,6%	67,5%	11,3%
2	Perempuan	66,2%	64,0%	10,9%

Tabel 3.1.2 Indeks Inklusi Keuangan Tahun 2016 Berdasarkan Strata Wilayah

No	Klaster	Indeks Inklusi Keuangan		
		Komposit	Konvensional	Syariah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perkotaan	71,2%	68,9%	12,0%
2	Perdesaan	63,2%	61,2%	9,7%

Tabel 3.1.3 Indeks Inklusi Keuangan Tahun 2016 Berdasarkan Pekerjaan

No	Klaster	Indeks Inklusi Keuangan		
		Komposit	Konvensional	Syariah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengusaha	66,6%	64,7%	9,8%
2	Pegawai dan Profesional	73,9%	71,6%	14,8%
3	Pelajar/Mahasiswa	64,2%	61,4%	8,3%
4	Ibu Rumah Tangga	61,4%	59,3%	7,9%
5	Pensiunan	74,0%	70,7%	10,7%
6	Tidak Bekerja dan Lainnya	55,3%	52,8%	4,9%

Tabel 3.1.4 Indeks Inklusi Keuangan Tahun 2016 Berdasarkan Usia

No	Klaster	Indeks Inklusi Keuangan		
		Komposit	Konvensional	Syariah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	15-17 Tahun	53,0%	52,2%	0,7%
2	18-25 Tahun	70,0%	67,5%	10,2%
3	26-35 Tahun	68,4%	66,8%	11,2%
4	36-50 Tahun	69,5%	67,2%	12,9%
5	di atas 50 Tahun	63,7%	61,1%	8,6%

Tabel 3.1.5 Indeks Inklusi Keuangan Tahun 2016 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Klaster	Indeks Inklusi Keuangan		
		Komposit	Konvensional	Syariah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tidak Bersekolah/Tidak Tamat SD	39,6%	37,3%	4,2%
2	Lulus SD	60,0%	58,2%	4,9%
3	Lulus SMP	57,4%	55,8%	5,5%
4	Lulus SMA	72,8%	70,2%	12,2%
5	Perguruan Tinggi	88,0%	85,7%	27,6%

Tabel 3.1.6 Indeks Inklusi Keuangan Tahun 2016 Berdasarkan Tingkat Pengeluaran

No	Klaster	Indeks Inklusi Keuangan		
		Komposit	Konvensional	Syariah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengeluaran A	82,4%	80,0%	20,3%
2	Pengeluaran B	73,6%	71,0%	14,8%
3	Pengeluaran C	68,8%	67,0%	9,7%
4	Pengeluaran D	60,4%	57,9%	7,7%
5	Pengeluaran E	55,8%	54,1%	7,4%

Catatan :

Pengeluaran A : Pengeluaran per bulan di atas Rp1.750.000,-

Pengeluaran B : Pengeluaran per bulan antara Rp1.250.001,- sd Rp1.750.000,-

Pengeluaran C : Pengeluaran per bulan antara Rp600.001,- sd Rp1.250.000,-

Pengeluaran D : Pengeluaran per bulan antara Rp400.000,- sd Rp600.000,-

Pengeluaran E : Pengeluaran per bulan di bawah Rp400.000,-

3.2. Indeks Inklusi per Provinsi

Tabel 3.2.1 Indeks Inklusi Keuangan Tahun 2016 per Provinsi

No	Provinsi	Indeks Inklusi Keuangan		
		Komposit	Konvensional	Syariah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	73,1%	67,6%	41,5%
2	Sumatera Utara	75,6%	75,6%	8,0%
3	Sumatera Barat	66,9%	66,2%	7,3%
4	Riau	69,5%	68,4%	8,4%
5	Jambi	66,9%	66,5%	7,3%
6	Sumatera Selatan	72,4%	71,3%	7,6%
7	Bengkulu	67,3%	65,5%	11,3%
8	Bangka Belitung	69,1%	65,8%	17,5%
9	Lampung	69,8%	66,5%	18,2%
10	Kepulauan Riau	74,5%	74,5%	8,0%
11	DKI Jakarta	78,2%	78,2%	17,5%
12	Jawa Barat	71,4%	67,8%	22,3%
13	Jawa Tengah	66,2%	64,9%	13,8%
14	DI Yogyakarta	76,7%	76,0%	13,5%
15	Jawa Timur	73,2%	68,8%	12,2%
16	Banten	69,5%	65,1%	21,1%
17	Bali	76,0%	76,0%	4,4%
18	Nusa Tenggara Barat	63,3%	59,6%	8,4%
19	Nusa Tenggara Timur	62,2%	61,1%	5,8%
20	Kalimantan Barat	65,5%	63,6%	6,5%
21	Kalimantan Tengah	60,4%	58,5%	7,6%
22	Kalimantan Selatan	59,3%	58,5%	2,5%
23	Kalimantan Timur	74,9%	69,8%	12,4%
24	Kalimantan Utara	61,5%	60,4%	2,9%
25	Sulawesi Utara	68,4%	66,9%	5,1%
26	Sulawesi Tengah	65,1%	65,1%	3,6%
27	Sulawesi Selatan	68,0%	61,1%	14,5%
28	Sulawesi Tenggara	66,9%	65,1%	10,9%
29	Gorontalo	62,5%	58,2%	12,4%
30	Sulawesi Barat	65,5%	64,7%	2,9%
31	Maluku	64,0%	63,6%	3,3%
32	Maluku Utara	64,0%	55,3%	24,7%
33	Papua Barat	58,5%	58,5%	2,2%
34	Papua	61,5%	60,0%	5,8%

Tabel 3.2.2 Indeks Inklusi Keuangan Tahun 2016 per Provinsi berdasarkan Gender

No	Provinsi	Indeks Inklusi Keuangan	
		Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aceh	75,7%	70,5%
2	Sumatera Utara	75,0%	76,3%
3	Sumatera Barat	66,4%	67,4%

Lanjutan Tabel 3.2.2

No	Provinsi	Indeks Inklusi Keuangan	
		Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Riau	68,6%	70,4%
5	Jambi	65,2%	68,6%
6	Sumatera Selatan	68,6%	76,1%
7	Bengkulu	63,8%	70,8%
8	Bangka Belitung	67,4%	70,8%
9	Lampung	69,8%	69,9%
10	Kepulauan Riau	77,9%	70,8%
11	DKI Jakarta	81,8%	74,2%
12	Jawa Barat	76,1%	67,0%
13	Jawa Tengah	69,7%	62,6%
14	DI Yogyakarta	76,1%	77,4%
15	Jawa Timur	68,4%	78,1%
16	Banten	70,9%	67,9%
17	Bali	80,6%	71,3%
18	Nusa Tenggara Barat	60,6%	66,2%
19	Nusa Tenggara Timur	65,2%	59,1%
20	Kalimantan Barat	62,3%	68,6%
21	Kalimantan Tengah	60,9%	59,9%
22	Kalimantan Selatan	55,4%	63,2%
23	Kalimantan Timur	85,0%	64,4%
24	Kalimantan Utara	67,4%	55,5%
25	Sulawesi Utara	64,0%	72,7%
26	Sulawesi Tengah	68,5%	61,2%
27	Sulawesi Selatan	68,8%	67,2%
28	Sulawesi Tenggara	70,4%	63,2%
29	Gorontalo	60,1%	65,2%
30	Sulawesi Barat	63,8%	67,2%
31	Maluku	66,2%	61,7%
32	Maluku Utara	73,7%	54,3%
33	Papua Barat	83,5%	33,1%
34	Papua	66,7%	56,2%

Tabel 3.2.3 Indeks Inklusi Keuangan Tahun 2016 per Provinsi berdasarkan Strata Wilayah

No	Nama Provinsi	Nama Kota/Kabupaten	Indeks Inklusi Keuangan
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Aceh	Banda Aceh	77,9%
		Pidie	68,3%
2	Sumatera Utara	Medan	70,3%
		Toba Samosir	81,0%
3	Sumatera Barat	Padang	60,6%
		Padang Pariaman	73,2%
4	Riau	Pekanbaru	73,0%
		Indragiri Hilir	65,9%
5	Jambi	Jambi	68,6%
		Sorangun	65,2%

Lanjutan Tabel 3.2.3

No	Nama Provinsi	Nama Kota/Kabupaten	Indeks Inklusi Keuangan
(1)	(2)	(3)	(5)
6	Sumatera Selatan	Palembang	78,3%
		Muara Enim	66,4%
7	Bengkulu	Bengkulu	69,1%
		Kepahiang	65,4%
8	Bangka Belitung	Pangkal Pinang	69,1%
9	Lampung	Bandar Lampung	71,7%
		Lampung Barat	67,9%
10	Kepulauan Riau	Batam	74,5%
11	DKI Jakarta	Jakarta Selatan	80,3%
		Kepulauan Seribu	76,1%
12	Jawa Barat	Bandung	84,1%
		Cirebon	57,7%
		Tasikmalaya	71,5%
13	Jawa Tengah	Semarang	67,7%
		Solo	88,4%
		Banyumas	42,6%
14	DI Yogyakarta	Yogyakarta	78,1%
		Sleman	75,4%
15	Jawa Timur	Surabaya	64,7%
		Malang	71,0%
		Jember	84,4%
16	Banten	Tangerang	66,4%
		Serang	72,5%
17	Bali	Denpasar	84,2%
		Buleleng	68,3%
18	Nusa Tenggara Barat	Mataram	66,4%
		Lombok Timur	60,1%
19	Nusa Tenggara Timur	Kupang	60,6%
		Flores Timur	63,8%
20	Kalimantan Barat	Pontianak	74,5%
		Landak	56,5%
21	Kalimantan Tengah	Palangkaraya	71,5%
		Barito Selatan	49,3%
22	Kalimantan Selatan	Banjarmasin	80,3%
		Hulu Tengah Sungai	38,4%
23	Kalimantan Timur	Samarinda	86,1%
		Kutai Timur	63,8%
24	Kalimantan Utara	Tanjung Selor	61,5%
25	Sulawesi Utara	Manado	83,9%
		Bolaang Mongondow Utara	52,9%
26	Sulawesi Tengah	Palu	73,9%
		Donggala	56,2%
27	Sulawesi Selatan	Makassar	81,0%
		Luwu Timur	55,1%

Lanjutan Tabel 3.2.3

No	Nama Provinsi	Nama Kota/Kabupaten	Indeks Inklusi Keuangan
(1)	(2)	(3)	(5)
28	Sulawesi Tenggara	Kendari	75,4%
		Kolaka Utara	58,4%
29	Gorontalo	Gorontalo	62,5%
30	Sulawesi Barat	Mamuju	65,5%
31	Maluku	Ambon	77,5%
		Buru Selatan	50,4%
32	Maluku Utara	Ternate	64,0%
33	Papua Barat	Manokwari	58,5%
34	Papua	Jayapura	68,1%
		Mimika	54,7%

Tabel 3.2.4 Indeks Inklusi Keuangan Tahun 2016 per Provinsi berdasarkan Tingkat Pengeluaran

No	Provinsi	Indeks Inklusi Keuangan				
		Pengeluaran A	Pengeluaran B	Pengeluaran C	Pengeluaran D	Pengeluaran E
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	90,3%	92,3%	82,7%	56,5%	20,0%
2	Sumatera Utara	75,8%	80,0%	78,7%	73,9%	47,4%
3	Sumatera Barat	45,5%	70,0%	78,0%	54,3%	52,6%
4	Riau	80,6%	78,0%	59,0%	72,1%	73,3%
5	Jambi	85,7%	64,6%	66,4%	67,6%	44,4%
6	Sumatera Selatan	50,0%	76,4%	72,0%	77,8%	72,5%
7	Bengkulu	87,9%	72,7%	56,4%	61,4%	71,4%
8	Bangka Belitung	92,6%	71,4%	61,3%	71,4%	53,3%
9	Lampung	94,7%	82,3%	75,0%	63,9%	40,5%
10	Kepulauan Riau	94,4%	76,8%	76,4%	44,4%	20,0%
11	DKI Jakarta	95,2%	76,9%	73,6%	78,0%	71,4%
12	Jawa Barat	80,0%	76,5%	77,1%	69,1%	56,8%
13	Jawa Tengah	88,2%	76,9%	63,5%	50,0%	63,6%
14	DI Yogyakarta	84,4%	83,7%	78,2%	75,0%	63,8%
15	Jawa Timur	95,0%	83,8%	75,4%	66,0%	45,5%
16	Banten	90,2%	85,4%	61,4%	64,4%	50,0%
17	Bali	74,5%	86,7%	76,7%	64,1%	100,0%
18	Nusa Tenggara Barat	82,6%	64,9%	60,3%	62,5%	50,0%
19	Nusa Tenggara Timur	92,3%	73,6%	86,8%	50,0%	46,5%
20	Kalimantan Barat	74,1%	77,8%	69,7%	45,3%	50,0%
21	Kalimantan Tengah	88,1%	66,7%	57,0%	50,6%	33,3%
22	Kalimantan Selatan	79,3%	56,0%	72,3%	32,1%	77,1%

Lanjutan Tabel 3.2.4

No	Provinsi	Indeks Inklusi Keuangan				
		Pengeluaran A	Pengeluaran B	Pengeluaran C	Pengeluaran D	Pengeluaran E
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23	Kalimantan Timur	82,4%	74,5%	69,2%	80,3%	83,3%
24	Kalimantan Utara	82,8%	73,1%	66,7%	46,3%	38,7%
25	Sulawesi Utara	83,3%	71,7%	76,5%	54,3%	61,1%
26	Sulawesi Tengah	80,0%	71,9%	61,5%	58,5%	70,0%
27	Sulawesi Selatan	81,5%	64,2%	76,5%	66,2%	47,2%
28	Sulawesi Tenggara	83,9%	70,2%	70,1%	61,2%	39,1%
29	Gorontalo	75,6%	69,0%	63,0%	46,7%	59,0%
30	Sulawesi Barat	47,1%	61,9%	73,6%	61,3%	66,7%
31	Maluku	78,3%	69,1%	61,7%	57,9%	65,0%
32	Maluku Utara	81,0%	86,5%	56,1%	60,8%	48,4%
33	Papua Barat	80,0%	54,7%	64,7%	44,9%	100,0%
34	Papua	80,0%	85,2%	51,8%	56,3%	50,0%

Catatan :

Pengeluaran A : Pengeluaran per bulan di atas Rp1.750.000,-

Pengeluaran B : Pengeluaran per bulan antara Rp1.250.001,- sd Rp1.750.000,-

Pengeluaran C : Pengeluaran per bulan antara Rp600.001,- sd Rp1.250.000,-

Pengeluaran D : Pengeluaran per bulan antara Rp400.000,- sd Rp600.000,-

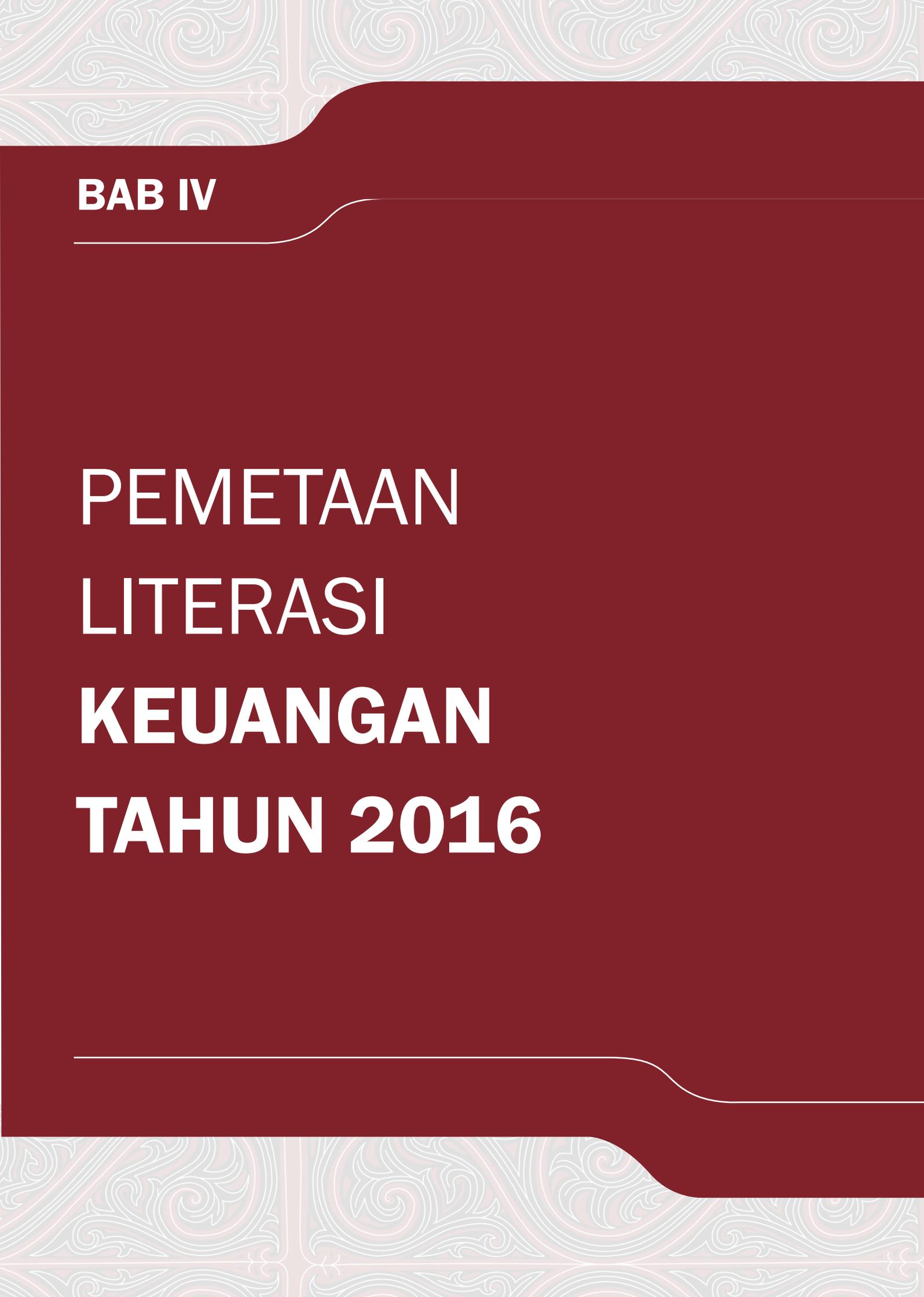
Pengeluaran E : Pengeluaran per bulan di bawah Rp400.000,-

Tabel 3.2.5 Popularitas Produk dan Layanan Jasa Keuangan per Provinsi Tahun 2016

No	Provinsi	Indeks Inklusi Keuangan				
		Produk I	Produk II	Produk III	Produk IV	Produk V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	Tabungan	Transfer	Kredit Kepemilikan Rumah/Apartemen	Pinjaman dengan Gadai	Asuransi Jiwa
2	Sumatera Utara	Tabungan	Transfer	Pembiayaan/ Leasing Kendaraan	Pinjaman dengan Gadai	Asuransi Jiwa
3	Sumatera Barat	Tabungan	Transfer	Pembiayaan/ Leasing Kendaraan	Pembiayaan/ Leasing Kendaraan	Kredit Usaha Rakyat
4	Riau	Tabungan	Transfer	Pinjaman dengan Gadai	Pembiayaan/ Leasing Kendaraan	Kredit Kepemilikan Rumah/Apartemen
5	Jambi	Tabungan	Transfer	Pinjaman dengan Gadai	Kredit Kepemilikan Rumah/Apartemen	Pembiayaan/ Leasing Kendaraan
6	Sumatera Selatan	Tabungan	Transfer	Pembiayaan/ Leasing Kendaraan	Pinjaman dengan Gadai	Kredit Kepemilikan Rumah/Apartemen
7	Bengkulu	Tabungan	Transfer	Pinjaman dengan Gadai	Kredit Kepemilikan Rumah/Apartemen	Program Pensiun Manfaat Pasti
8	Bangka Belitung	Tabungan	Transfer	Pinjaman dengan Gadai	Pembiayaan/ Leasing Kendaraan	Kredit/Pembiayaan Kendaraan
9	Lampung	Tabungan	Transfer	Pinjaman dengan Gadai	Kredit Kepemilikan Rumah/Apartemen	Pembiayaan/ Leasing Kendaraan
10	Kepulauan Riau	Tabungan	Transfer	Pinjaman dengan Gadai	Asuransi Pendidikan	Asuransi Kesehatan
11	DKI Jakarta	Tabungan	Transfer	Pembiayaan/ Leasing Kendaraan	Asuransi Jiwa	Asuransi Pendidikan

Lanjutan Tabel 3.2.5

No	Provinsi	Indeks Inklusi Keuangan				
		Produk I	Produk II	Produk III	Produk IV	Produk V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	Jawa Barat	Tabungan	Transfer	Pinjaman dengan Gadai	Deposito	Asuransi Pendidikan
13	Jawa Tengah	Tabungan	Transfer	Pembiayaan/ Leasing Kendaraan	Asuransi Kendaraan	Asuransi Pendidikan
14	DI Yogyakarta	Tabungan	Transfer	Asuransi Kesehatan	Asuransi Kesehatan	Kredit Kepemilikan Rumah/Apartemen
15	Jawa Timur	Tabungan	Transfer	Pembiayaan/ Leasing Kendaraan	Asuransi Kesehatan	Asuransi Kesehatan
16	Banten	Tabungan	Transfer	Pembiayaan/ Leasing Kendaraan	Pinjaman dengan Gadai	Asuransi Jiwa
17	Bali	Tabungan	Transfer	Deposito	Giro	Kredit/Pembiayaan Kendaraan
18	Nusa Tenggara Barat	Tabungan	Transfer	Pembiayaan/ Leasing Kendaraan	Asuransi Jiwa	Asuransi Kesehatan
19	Nusa Tenggara Timur	Tabungan	Transfer	Deposito	Program Pensiun Manfaat Pasti	Giro
20	Kalimantan Barat	Tabungan	Transfer	Pembiayaan/ Leasing Kendaraan	Asuransi Kesehatan	Deposito
21	Kalimantan Tengah	Tabungan	Transfer	Kredit/Pembiayaan Kendaraan	Program Pensiun Manfaat Pasti	Asuransi Jiwa
22	Kalimantan Selatan	Tabungan	Transfer	Pinjaman dengan Gadai	Pembiayaan/ Leasing Kendaraan	Program Pensiun Manfaat Pasti
23	Kalimantan Timur	Tabungan	Transfer	Pembiayaan/ Leasing Kendaraan	Asuransi Kendaraan	Asuransi Kendaraan
24	Kalimantan Utara	Tabungan	Transfer	Pembiayaan/ Leasing Kendaraan	Program Pensiun Manfaat Pasti	Asuransi Kendaraan
25	Sulawesi Utara	Tabungan	Transfer	Pembiayaan/ Leasing Kendaraan	Program Pensiun Manfaat Pasti	Asuransi Kendaraan
26	Sulawesi Tengah	Tabungan	Transfer	Kredit/Pembiayaan Kendaraan	Asuransi Jiwa	Kredit/Pembiayaan dengan jaminan
27	Sulawesi Selatan	Tabungan	Transfer	Pembiayaan/ Leasing Kendaraan	Pinjaman dengan Gadai	Asuransi Kendaraan
28	Sulawesi Tenggara	Tabungan	Transfer	Pinjaman dengan Gadai	Pembiayaan/ Leasing Kendaraan	Kredit/Pembiayaan Kendaraan
29	Gorontalo	Tabungan	Transfer	Pembiayaan/ Leasing Kendaraan	Program Pensiun Manfaat Pasti	Asuransi Kendaraan
30	Sulawesi Barat	Tabungan	Transfer	Pembiayaan/ Leasing Kendaraan	Asuransi Kendaraan	Pembiayaan Elektronik dan Alat Rumah Tangga
31	Maluku	Tabungan	Transfer	Pembiayaan/ Leasing Kendaraan	Pinjaman dengan Gadai	Asuransi Jiwa
32	Maluku Utara	Tabungan	Transfer	Deposito	Pembiayaan/ Leasing Kendaraan	Kredit Kepemilikan Rumah/Apartemen
33	Papua Barat	Tabungan	Transfer	Kredit/Pembiayaan Kendaraan	Pinjaman dengan Gadai	Pembiayaan/ Leasing Kendaraan
34	Papua	Tabungan	Transfer	Pinjaman dengan Gadai	Asuransi Jiwa	Kredit/Pembiayaan Kendaraan



BAB IV

**PEMETAAN
LITERASI
KEUANGAN
TAHUN 2016**

PEMETAAN LITERASI KEUANGAN TAHUN 2016

BAB IV

4.1. Lembaga Jasa Keuangan

Tabel 4.1.1 Pengetahuan terhadap Lembaga Jasa Keuangan (LJK)

No	Sektor		Pengetahuan terhadap LJK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perbankan	Komposit	99,8%
		Konvensional	99,5%
		Syariah	19,0%
2	Asuransi	Komposit	60,3%
		Konvensional	59,0%
		Syariah	7,4%
3	Dana Pensiun	Komposit	22,4%
		Konvensional	22,4%
		Syariah	0,0%
4	Perusahaan Efek/Sekuritas	Komposit	10,6%
		Konvensional	9,2%
		Syariah	1,5%
5	Manajer Investasi	Komposit	9,2%
		Konvensional	8,2%
		Syariah	1,1%
6	Pasar Modal ¹	Komposit	15,7%
		Konvensional	13,4%
		Syariah	2,5%
7	Perusahaan Pembiayaan	Komposit	49,7%
		Konvensional	49,1%
		Syariah	2,4%
8	Modal Ventura	Komposit	5,5%
		Konvensional	5,5%
		Syariah	0,0%
9	Lembaga Pembiayaan ²	Komposit	49,8%
		Konvensional	49,3%
		Syariah	2,4%
10	Pergadaian	Komposit	58,2%
		Konvensional	56,2%
		Syariah	6,6%
11	BPJS Kesehatan ³		85,7%
12	BPJS Ketenagakerjaan ³		32,9%
13	Lembaga Keuangan Mikro ³	Komposit	29,7%
		Konvensional	29,7%
		Syariah	0,1%

Lanjutan Tabel 4.1.1

No	Sektor		Pengetahuan terhadap LJK
(1)	(2)	(3)	(4)
14	Koperasi ³	Komposit	71,4%
		Konvensional	71,4%
		Syariah	0,2%
15	Baitul Maal wa Tamwil (BMT) ³		27,1%
16	Lembaga Keuangan non Formal ³	Arisan	88,5%
		Gadai (diluar PT Pegadaian)	48,7%
		Tukang Kredit	75,5%

Catatan :

¹ Pengetahuan terhadap Pasar Modal merupakan komposit dari pengetahuan terhadap Perusahaan Efek dan Manajer Investasi.

² Pengetahuan terhadap Lembaga Pembiayaan merupakan komposit dari pengetahuan terhadap Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura

³ LJK tidak termasuk dalam perhitungan indeks literasi keuangan

Tabel 4.1.2 Keyakinan terhadap Lembaga Jasa Keuangan (LJK)

No	Sektor		Pengetahuan terhadap LJK
			%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perbankan	Komposit	90,5%
		Konvensional	88,9%
		Syariah	14,7%
2	Asuransi	Komposit	37,1%
		Konvensional	35,8%
		Syariah	5,4%
3	Dana Pensiun	Komposit	17,4%
		Konvensional	17,4%
		Syariah	0,0%
4	Perusahaan Efek/Sekuritas	Komposit	4,5%
		Konvensional	4,5%
		Syariah	0,1%
5	Manajer Investasi	Komposit	4,8%
		Konvensional	3,9%
		Syariah	1,1%
6	Pasar Modal ¹	Komposit	9,0%
		Konvensional	8,1%
		Syariah	1,1%
7	Perusahaan Pembiayaan	Komposit	27,0%
		Konvensional	26,0%
		Syariah	1,3%
8	Modal Ventura	Komposit	0,1%
		Konvensional	0,1%
		Syariah	0,0%
9	Lembaga Pembiayaan ²	Komposit	27,0%
		Konvensional	26,0%
		Syariah	1,3%
10	Pegadaian	Komposit	42,2%
		Konvensional	40,0%
		Syariah	5,0%

Lanjutan Tabel 4.1.2

No	Sektor		Pengetahuan terhadap LJK
			%
(1)	(2)	(3)	(4)
11	BPJS Kesehatan ³		77.9%
12	BPJS Ketenagakerjaan ³		21.1%
13	Lembaga Keuangan Mikro ³	Komposit	1,2%
		Konvensional	1,2%
		Syariah	0,0%
14	Koperasi ³	Komposit	39,0%
		Konvensional	39,0%
		Syariah	0,2%
15	Baitul Maal wa Tamwil (BMT) ³		4.2%
16	Lembaga Keuangan non Formal ³	Arisan	21.7%
		Gadai (diluar PT Pegadaian)	2.9%
		Tukang Kredit	5.0%

Catatan :

¹ Keyakinan terhadap Pasar Modal merupakan komposit dari pengetahuan terhadap Perusahaan Efek dan Manajer Investasi.

² Keyakinan terhadap Lembaga Pembiayaan merupakan komposit dari pengetahuan terhadap Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura

³ LJK tidak termasuk dalam perhitungan indeks literasi keuangan

Tabel 4.1.3 Alasan Meyakini LJK Konvensional

No	Alasan Meyakini LJK Konvensional	% ¹
(1)	(2)	(3)
1	Dijamin oleh pemerintah	90,4%
2	Memiliki risiko rendah	58,7%
3	Memberikan keuntungan	55,5%
4	Sesuai dengan kebutuhan	60,7%
5	Memberikan rasa aman	77,2%
6	Diawasi dan diatur oleh otoritas	18,2%
7	LJK memiliki kredibilitas yang baik	11,2%

Catatan :

¹ Presentase alasan meyakini LJK Konvensional adalah perbandingan antara alasan meyakini LJK Konvensional dengan jumlah responden yang meyakini LJK Konvensional.

Tabel 4.1.4 Alasan Meyakini LJK Syariah

No	Alasan Meyakini LJK Syariah	% ¹
(1)	(2)	(3)
1	Dijamin oleh pemerintah	55,1%
2	Sesuai dengan ajaran agama	54,2%
3	Lebih tenang (sesuai dengan hati nurani) dalam bertransaksi	46,2%
4	Bebas dari riba	47,5%
5	Teladan tokoh agama	26,7%
6	Diawasi dan diatur oleh Otoritas	16,7%

Catatan :

¹ Presentase alasan meyakini LJK Syariah adalah perbandingan antara alasan meyakini LJK Syariah dengan jumlah responden yang meyakini LJK Syariah.

4.2 Produk dan Layanan Jasa Keuangan

Tabel 4.2.1 Pengetahuan tentang Produk dan Layanan Perbankan

No	Produk Perbankan		Pengetahuan Produk
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tabungan	Komposit	99,3%
		Konvensional	98,5%
		Syariah	18,1%
2	Deposito	Komposit	48,0%
		Konvensional	47,8%
		Syariah	1,5%
3	Giro	Komposit	29,3%
		Konvensional	29,1%
		Syariah	1,0%
4	Transfer	Komposit	86,0%
		Konvensional	85,5%
		Syariah	4,6%
5	Kredit/Pembiayaan dengan Jaminan	Komposit	19,8%
		Konvensional	19,6%
		Syariah	0,5%
6	Kredit/Pembiayaan tanpa Jaminan	Komposit	13,6%
		Konvensional	13,5%
		Syariah	0,2%
7	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Komposit	24,6%
		Konvensional	24,4%
		Syariah	0,4%
8	KPR/KPA	Komposit	21,4%
		Konvensional	21,4%
		Syariah	0,1%
9	Kredit/Pembiayaan Mikro	Komposit	12,6%
		Konvensional	12,4%
		Syariah	0,3%
10	Kredit Pembiayaan Kendaraan	Komposit	16,5%
		Konvensional	16,3%
		Syariah	0,5%
11	Uang Elektronik	Komposit	6,1%
		Konvensional	6,1%
		Syariah	0,0%
12	Gadai/Rahn	Komposit	4,1%
		Konvensional	0,0%
		Syariah	4,1%
13	Sewa/Ijarah	Komposit	1,4%
		Konvensional	0,0%
		Syariah	1,4%

Tabel 4.2.2 Pengetahuan tentang Produk dan Layanan Perasuransian

No	Produk Asuransi		Pengetahuan Produk
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Asuransi Jiwa	Komposit	33,5%
		Konvensional	32,5%
		Syariah	4,2%
2	Unit Link/Bancassurance	Komposit	4,0%
		Konvensional	4,0%
		Syariah	0,0%

Lanjutan Tabel 4.2.2

No	Produk Asuransi		Pengetahuan Produk
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Asuransi Pendidikan	Komposit	28,2%
		Konvensional	28,2%
		Syariah	3,4%
4	Asuransi Kesehatan	Komposit	31,2%
		Konvensional	30,6%
		Syariah	6,2%
5	Asuransi Kendaraan Bermotor	Komposit	25,2%
		Konvensional	25,2%
		Syariah	0,7%
6	Asuransi Kecelakaan Diri	Komposit	6,0%
		Konvensional	6,0%
		Syariah	0,0%
7	Asuransi Kebakaran	Komposit	5,1%
		Konvensional	5,1%
		Syariah	0,0%
8	Asuransi Perjalanan	Komposit	4,5%
		Konvensional	4,5%
		Syariah	0,0%
9	Asuransi Pertanian	Komposit	0,7%
		Konvensional	0,6%
		Syariah	0,0%
10	Asuransi Mikro	Komposit	1,1%
		Konvensional	1,0%
		Syariah	0,0%

Tabel 4.2.3 Pengetahuan tentang Produk dan Layanan Lembaga Pembiayaan

No	Produk Lembaga Pembiayaan		Pengetahuan Produk
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembiayaan/ Leasing Kendaraan	Komposit	38,6%
		Konvensional	38,3%
		Syariah	1,9%
2	Pembiayaan Mesin dan Alat Pertanian	Komposit	3,6%
		Konvensional	3,6%
		Syariah	0,0%
3	Pembiayaan Elektronik dan Alat Rumah Tangga	Komposit	9,4%
		Konvensional	9,2%
		Syariah	0,2%
4	Sewa Guna (Sewa Pembiayaan)	Komposit	3,2%
		Konvensional	3,2%
		Syariah	0,0%
5	Penyertaan Saham	Komposit	1,0%
		Konvensional	1,0%
		Syariah	0,0%
6	Obligasi Konversi	Komposit	0,3%
		Konvensional	0,3%
		Syariah	0,0%
7	Pembiayaan bagi hasil	Komposit	0,6%
		Konvensional	0,6%
		Syariah	0,0%

Tabel 4.2.4 Pengetahuan tentang Produk dan Layanan Dana Pensiun

No	Produk Dana Pensiun		Pengetahuan Produk
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pensiun Manfaat Pasti	Komposit	20,3%
		Konvensional	20,3%
		Syariah	0,0%
2	Program Pensiun Iuran Pasti	Komposit	9,7%
		Konvensional	9,7%
		Syariah	0,0%

Tabel 4.2.5 Pengetahuan tentang Produk dan Layanan Pergadaian

No	Produk Pergadaian		Pengetahuan Produk
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pinjaman dengan Gadai	Komposit	56,6%
		Konvensional	54,1%
		Syariah	6,6%
2	Pinjaman dengan Fidusia	Komposit	4,3%
		Konvensional	4,3%
		Syariah	0,1%
3	Investasi Emas/Logam Mulia	Komposit	5,4%
		Konvensional	5,2%
		Syariah	0,3%

Tabel 4.2.6 Pengetahuan tentang Produk dan Layanan Pasar Modal

No	Produk Perusahaan Efek/Sekuritas		Pengetahuan Produk
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Saham	Komposit	9,8%
		Konvensional	9,8%
		Syariah	1,5%
2	Obligasi/Sukuk	Komposit	4,0%
		Konvensional	4,0%
		Syariah	0,0%
3	Reksa Dana	Komposit	7,9%
		Konvensional	6,9%
		Syariah	2,6%

Tabel 4.2.7 Pengetahuan tentang Produk dan Layanan BPJS1

No	BPJS	Pengetahuan Produk
(1)	(2)	(3)
1	BPJS Kesehatan	83.8%
2	BPJS Ketenagakerjaan	28.7%

Catatan:

¹ Produk dan layanan tidak termasuk dalam perhitungan indeks literasi keuangan

Tabel 4.2.8 Pengetahuan tentang Produk dan Layanan LJK Formal Lainnya¹

No	LJK Formal Lainnya		Pengetahuan Produk
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tabungan/Simpanan	Komposit	11,5%
		Konvensional	11,5%
		Syariah	0,1%
2	Pinjaman	Komposit	8,5%
		Konvensional	8,4%
		Syariah	0,1%

Catatan:

¹ Produk dan layanan tidak termasuk dalam perhitungan indeks literasi keuangan**Tabel 4.2.9 Pengetahuan terhadap Karakteristik Produk**

No	Karakteristik	%
(1)	(2)	(3)
1	Fitur Produk atau Layanan	82,7%
2	Manfaat Produk atau Layanan	86,0%
3	Risiko Produk atau Layanan	36,1%
4	Hak Konsumen	40,5%
5	Kewajiban Konsumen	36,1%
6	Biaya	37,6%
7	Denda	66,0%
8	Cara Memperoleh Produk atau Layanan	40,6%

4.3 Kemampuan Keuangan

Tabel 4.3.1 Pernyataan Kemampuan Berhitung

No	Karakteristik	%
(1)	(2)	(3)
1	Bunga/ Bagi hasil (pinjaman/simpanan)	30,7%
2	Angsuran (pinjaman)	27,6%
3	Hasil Investasi	10,0%
4	Biaya Penggunaan Produk/Layanan	20,3%
5	Denda	18,7%
6	Nilai mata uang/inflasi	11,1%

Catatan:

Masyarakat yang menyatakan paham dalam menghitung aspek-aspek di atas.

Tabel 4.3.2 Kemampuan Menghitung

No	Keterampilan	Persentase Jawaban Benar
(1)	(2)	(3)
1	Aritmatika Sederhana "Apabila 5 orang bersaudara diberi uang sebesar Rp100.000, dan mereka harus membagi uang tersebut sama rata, berapa jumlah uang yang diterima masing-masing?"	93,6%
2	Pemahaman Konsep Nilai Mata Uang "Apabila kelima saudara tersebut harus menunggu selama 1 tahun untuk mendapatkan bagian uang mereka, dengan asumsi tingkat inflasi yang sama, maka mereka akan mampu membeli : (lebih banyak / sama banyak / lebih sedikit / tergantung barang yang dibeli)"	13,4%
3	Pemahaman Konsep Bunga "Jika anda menabung sebesar Rp100.000, dengan suku bunga 2% per tahun, berapa jumlah tabungan anda di akhir tahun pertama? (dengan asumsi anda tidak melakukan penyetoran atau penarikan uang)"	62,1%
4	Pemahaman Konsep Investasi "Apakah anda percaya bahwa investasi yang memberikan keuntungan besar cenderung memiliki risiko yang tinggi?"	62,6%

4.4 Informasi Keuangan

Tabel 4.4.1 Sumber Informasi Keuangan

No	Sumber	%
(1)	(2)	(3)
1	Iklan TV	51,7%
2	Saran dari teman (bukan pelaku industri keuangan)	31,7%
3	Program TV atau Radio	26,4%
4	Informasi yang diperoleh di kantor cabang LJK	23,4%
5	Iklan Koran	18,2%

Tabel 4.4.2 Sumber Konsultasi Keuangan

No	Sumber	%
(1)	(2)	(3)
1	Pasangan	55,6%
2	Keluarga/teman	54,4%
3	Orang tua	19,6%
4	Petugas LJK atau praktisi keuangan lain	16,4%
5	Rekan kerja	10,6%

4.5 Pengelolaan Keuangan

Tabel 4.5.1 Tujuan Keuangan

No	Keterangan	%
(1)	(2)	(3)
	Memiliki Tujuan Keuangan	96,7%
1	Memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari	50,7%
2	Mempertahankan hidup	18,3%
3	Membayar biaya pendidikan anak	8,3%
4	Mempersiapkan hari tua	6,3%
5	Membayar biaya pendidikan	4,3%
6	Mengembangkan usaha	3,1%
7	Meningkatkan kualitas hidup	2,0%
8	Menyediakan dana darurat	1,5%
9	Memenuhi biaya kesehatan	1,4%
10	Lainnya	4,1%

Catatan :

Persentase alternatif tujuan keuangan adalah perbandingan terhadap responden yang memiliki tujuan keuangan.

Tabel 4.5.2 Upaya Mencapai Tujuan Keuangan

No	Upaya	%
(1)	(2)	(3)
1	Menabung	74,6%
2	Menyusun rencana keuangan	41,8%
3	Bekerja/mencari pekerjaan	38,0%
4	Mengurangi pengeluaran	12,8%
5	Mengembangkan usaha mandiri	12,4%
6	Mencari pinjaman	6,8%
7	Melakukan investasi	5,1%
8	Mencari alternatif sumber utang	2,1%
9	Meningkatkan plafon pinjaman	1,1%

Catatan :

Persentase alternatif upaya untuk mencapai tujuan keuangan adalah perbandingan terhadap responden yang memiliki tujuan keuangan

4.6 Penganggaran Keuangan

Tabel 4.6.1 Penyusunan Anggaran

No	Keterangan	%
(1)	(2)	(3)
	Menyusun anggaran	54,9%
1	Secara rinci	27,5%
2	Hanya rencana besaran	72,5%

Catatan :

Persentase alternatif penyusunan anggaran keuangan adalah perbandingan terhadap responden yang melakukan penyusunan anggaran

Tabel 4.6.2 Komitmen Pelaksanaan Anggaran

No	Keterangan	%
(1)	(2)	(3)
	Komitmen anggaran	47,1%
1	Selalu berkomitmen	35,7%
2	Kadang-kadang	64,3%

Catatan :

Persentase alternatif komitmen pelaksanaan anggaran keuangan adalah perbandingan terhadap responden yang memiliki komitmen terhadap penganggaran keuangan

Tabel 4.6.3 Preferensi Produk saat Uang Berlebih

No	Produk/Alternatif	%
(1)	(2)	(3)
1	Menabung (tabungan)	90,0%
2	Membeli properti	30,5%
3	Membeli kendaraan	20,4%
4	Menjadi peserta BPJS Kesehatan	19,1%
5	Membayai peningkatan kualitas hidup	13,1%
6	Melakukan deposito	7,1%
7	Membeli produk asuransi jiwa	7,0%
8	Membeli Emas/Logam Mulia	5,7%
9	Membeli produk asuransi kesehatan	4,3%
10	Membeli produk asuransi pendidikan	3,8%

4.7 Ketahanan Keuangan

Tabel 4.7.1 Cara yang dilakukan untuk Memenuhi Kebutuhan di Hari Tua

No	Produk	%
(1)	(2)	(3)
1	Menabung	63,5%
2	Tetap bekerja	44,5%
3	Berbisnis	21,1%
4	Membeli asuransi kesehatan dari BPJS Kesehatan	14,8%
5	Penjualan aset non keuangan (mobil, properti, perhiasan, barang antik, dll)	6,9%

Lanjutan Tabel 4.7.1

No	Produk	%
(1)	(2)	(3)
6	Bergantung pada pasangan	5,5%
7	Bergantung pada anak atau anggota keluarga lain	4,8%
8	Menjadi peserta Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)	3,3%
9	Mendepositokan sejumlah uang	3,1%
10	Menjadi peserta Program Dana Pensiun BPJS Ketenagakerjaan	3,1%

Tabel 4.7.2 Ketahanan Keuangan Apabila Kekurangan Pendapatan/ Pengeluaran Besar Secara Tiba-tiba

No	Produk	Apabila Kekurangan Pendapatan/ Pengeluaran Besar Secara Tiba-tiba
(1)	(2)	(3)
1	Menarik tabungan	63,6%
2	Meminjam dari keluarga, teman, rekan kerja	51,2%
3	Menjual sesuatu yang dimiliki	29,7%
4	Menerima pemberian uang dari keluarga atau teman	24,8%
5	Bekerja ekstra	23,2%
6	Mengurangi konsumsi barang sekunder/tersier (berhemat)	10,5%
7	Meminjam dengan gadai	7,1%
8	Meminjam pada alternatif lain	5,7%
9	Mengurangi konsumsi barang pokok	5,4%
10	Meminjam pada rentenir/kelompok simpan pinjam (arisan)	5,4%

Tabel 4.7.3 Upaya Yang Dilakukan Apabila Kehilangan Pekerjaan

No	Produk	Apabila Kehilangan Pekerjaan
(1)	(2)	(3)
1	Mencairkan tabungan	61,7%
2	Meminjam dari keluarga, teman, rekan kerja	45,1%
3	Menjual sesuatu yang dimiliki	41,0%
4	Menerima pemberian uang dari keluarga atau teman	21,3%
5	Bekerja ekstra	20,2%
6	Mengurangi konsumsi barang sekunder/tersier (berhemat)	16,7%
7	Mengurangi konsumsi barang pokok	10,6%
8	Pinjaman dengan gadai	5,8%
9	Meminjam pada rentenir/kelompok simpan pinjam (arisan)	5,7%
10	Meminjam pada alternatif lain	5,6%

Tabel 4.7.4 Keyakinan terhadap Kemampuan Keuangan

No	Pernyataan	%
(1)	(2)	(3)
1	Yakin terhadap Kemampuan Pengelolaan Pribadi	17,0%
2	Tidak yakin terhadap kemampuan kemampuan pengelolaan keuangan pribadi	9,6%

BAB V

**PEMETAAN
INKLUSI
KEUANGAN
TAHUN 2016**

PEMETAAN INKLUSI KEUANGAN TAHUN 2016

BAB V

5.1. Penggunaan Produk dan Layanan Jasa Keuangan Formal 1 Tahun Terakhir

Tabel 5.1.1 Penggunaan Produk dan Layanan Perbankan 1 Tahun Terakhir

No	Produk Perbankan		Penggunaan Produk
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tabungan	Komposit	63,6%
		Konvensional	58,6%
		Syariah	9,1%
2	Deposito	Komposit	4,7%
		Konvensional	3,5%
		Syariah	1,6%
3	Giro	Komposit	2,1%
		Konvensional	1,3%
		Syariah	0,9%
4	Transfer	Komposit	45,8%
		Konvensional	45,2%
		Syariah	1,8%
5	Kredit/Pembiayaan dengan Jaminan	Komposit	2,1%
		Konvensional	2,1%
		Syariah	0,0%
6	Kredit/Pembiayaan tanpa Jaminan	Komposit	1,1%
		Konvensional	1,1%
		Syariah	0,0%
7	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Komposit	2,2%
		Konvensional	2,2%
		Syariah	0,0%
8	KPR/KPA	Komposit	5,4%
		Konvensional	5,4%
		Syariah	0,0%
9	Kredit/Pembiayaan Mikro	Komposit	1,6%
		Konvensional	1,6%
		Syariah	0,0%
10	Kredit Pembiayaan Kendaraan	Komposit	4,9%
		Konvensional	4,9%
		Syariah	0,0%
11	Uang Elektronik	Komposit	1,0%
		Konvensional	1,0%
		Syariah	0,0%

Lanjutan Tabel 5.1.1

No	Produk Perbankan		Penggunaan Produk
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Gadai/Rahn	Komposit	0,1%
		Konvensional	0,0%
		Syariah	0,1%
13	Sewa/Ijarah	Komposit	0,0%
		Konvensional	0,0%
		Syariah	0,0%

Tabel 5.1.2 Penggunaan Produk dan Layanan Perasuransian 1 Tahun Terakhir

No	Produk Asuransi		Penggunaan Produk
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Asuransi Jiwa	Komposit	6,4%
		Konvensional	6,1%
		Syariah	1,3%
2	Unit Link/Bancassurance	Komposit	1,2%
		Konvensional	1,1%
		Syariah	0,1%
3	Asuransi Pendidikan	Komposit	5,5%
		Konvensional	5,3%
		Syariah	1,3%
4	Asuransi Kesehatan	Komposit	5,7%
		Konvensional	5,5%
		Syariah	1,2%
5	Asuransi Kendaraan Bermotor	Komposit	4,6%
		Konvensional	4,6%
		Syariah	0,1%
6	Asuransi Kecelakaan Diri	Komposit	1,0%
		Konvensional	0,8%
		Syariah	0,2%
7	Asuransi Kebakaran	Komposit	0,7%
		Konvensional	0,6%
		Syariah	0,1%
8	Asuransi Perjalanan	Komposit	0,5%
		Konvensional	0,5%
		Syariah	0,0%
9	Asuransi Pertanian	Komposit	0,1%
		Konvensional	0,1%
		Syariah	0,0%
10	Asuransi Mikro	Komposit	0,2%
		Konvensional	0,2%
		Syariah	0,0%

Tabel 5.1.3 Penggunaan Produk dan Layanan Lembaga Pembiayaan 1 Tahun Terakhir

No	Produk Lembaga Pembiayaan	Penggunaan Produk	
(1)	(2)	(3)	
1	Pembiayaan/ Leasing Kendaraan	Komposit	11,8%
		Konvensional	11,7%
		Syariah	0,2%
2	Pembiayaan Mesin dan Alat Pertanian	Komposit	0,3%
		Konvensional	0,3%
		Syariah	0,0%
3	Pembiayaan Elektronik dan Alat Rumah Tangga	Komposit	1,4%
		Konvensional	1,3%
		Syariah	0,1%
4	Sewa Guna (Sewa Pembiayaan)	Komposit	0,2%
		Konvensional	0,2%
		Syariah	0,0%
5	Penyertaan Saham	Komposit	0,0%
		Konvensional	0,0%
		Syariah	0,0%
6	Obligasi Konversi	Komposit	0,0%
		Konvensional	0,0%
		Syariah	0,0%
7	Pembiayaan bagi hasil	Komposit	0,1%
		Konvensional	0,1%
		Syariah	0,0%

Tabel 5.1.4 Penggunaan Produk dan Layanan Dana Pensiun 1 Tahun Terakhir

No	Produk	Penggunaan Produk	
(1)	(2)	(3)	
		(4)	
1	Program Pensiun Manfaat Pasti	Komposit	4,3%
		Konvensional	4,3%
		Syariah	0,0%
2	Program Pensiun Iuran Pasti	Komposit	1,7%
		Konvensional	1,7%
		Syariah	0,0%

Tabel 5.1.5 Penggunaan Produk dan Layanan Pergadaian 1 Tahun Terakhir

No	Produk Pergadaian	Penggunaan Produk	
(1)	(2)	(3)	
		(4)	
1	Pinjaman dengan Gadai	Komposit	10,3%
		Konvensional	9,8%
		Syariah	0,6%
2	Pinjaman dengan Fidusia	Komposit	0,4%
		Konvensional	0,3%
		Syariah	0,0%
3	Investasi Emas/Logam Mulia	Komposit	0,5%
		Konvensional	0,3%
		Syariah	0,1%

Tabel 5.1.6 Penggunaan Produk dan Layanan Pasar Modal 1 Tahun Terakhir

No	Produk Pasar Modal		Penggunaan Produk
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Saham	Komposit	1,1%
		Konvensional	1,1%
		Syariah	0,0%
2	Obligasi/Sukuk	Komposit	0,1%
		Konvensional	0,1%
		Syariah	0,0%
3	Reksa Dana	Komposit	0,2%
		Konvensional	0,2%
		Syariah	0,0%

Catatan:

¹ Produk dan layanan tidak termasuk dalam perhitungan indeks literasi keuangan**Tabel 5.1.7 Penggunaan Produk dan Layanan BPJS 1 Tahun Terakhir¹**

No	Produk	Penggunaan Produk
(1)	(2)	(3)
1	BPJS Kesehatan	63.8%
2	BPJS Ketenagakerjaan	5.2%

Catatan:

¹ Produk dan layanan tidak termasuk dalam perhitungan indeks literasi keuangan**Tabel 5.1.8 Penggunaan Produk dan Layanan LJK Lainnya 1 Tahun Terakhir¹**

No	Produk		Penggunaan Produk
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tabungan/Simpanan	Komposit	3,7%
		Konvensional	3,6%
		Syariah	0,0%
2	Pinjaman	Komposit	2,1%
		Konvensional	2,1%
		Syariah	0,1%

Catatan:

¹ Produk dan layanan tidak termasuk dalam perhitungan indeks literasi keuangan

5.2 Tujuan Menggunakan Produk

Tabel 5.2.1 Tujuan Menggunakan Produk

No	Tujuan	%
(1)	(2)	(3)
1	Alat Transaksi Keuangan Sehari-hari	83,0%
2	Sarana Penyimpanan Dana	87,3%
3	Sarana Investasi	40,9%
4	Mengurangi/ Memitigasi/ Mendiversifikasi risiko	24,1%
5	Menjamin Hari Tua	41,0%
6	Menjamin Biaya Kesehatan	14,4%

Lanjutan Tabel 5.2.1

No	Tujuan	%
(1)	(2)	(3)
7	Menjamin Biaya Pendidikan	15,6%
8	Memberi Rasa Aman	68,4%
9	Mengembang-kan Kegiatan Usaha	21,0%
10	Memperoleh Keuntungan	25,0%
11	Sebagai Dana Darurat/ Cadangan	29,2%
12	Meningkatkan gaya hidup (lifestyle)	3,8%

Catatan :

Persentase tujuan menggunakan produk adalah perbandingan antara tujuan menggunakan produk tertentu terhadap total responden yang memiliki tujuan dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.

5.3 Frekuensi Penggunaan Produk dan Layanan Jasa Keuangan

Tabel 5.3.1 Frekuensi Penggunaan Produk dan Layanan Jasa Keuangan

No	Produk dan Layanan	Rata-rata Penggunaan Produk dan Layanan Jasa Keuangan per Bulan
(1)	(2)	(3)
Perbankan		
1	Tabungan	1,6
2	Giro	2,1
3	Transfer	2,2
4	Uang Elektronik	2,7
5	Gadai/Rahn	1,0
6	Kredit/Pinjaman tanpa Jaminan	1,0
Perasuransian		
7	Unit Link/ <i>Bancassurance</i>	1,0
8	Asuransi Perjalanan	1,0
Pergadaian		
9	Gadai	1,1
Perusahaan Efek/Sekuritas		
10	Saham	1,0
11	Obligasi/Sukuk	0,0
Manajer Investasi/ <i>Asset Management</i>		
12	Reksa Dana	1,0
Lembaga Keuangan Formal Lainnya		
13	Simpanan/Tabungan	1,9
14	Pinjaman	1,3

5.4 Delivery Channel

Tabel 5.4.1 Pengetahuan Delivery Channel

No	Delivery Channel	Pengetahuan Delivery Channel
(1)	(2)	(3)
1	Kantor LJK	96,2%
2	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	92,1%
3	Electronic Data Capture (EDC)	23,5%
4	Online Transaction	12,1%
5	Phone Banking	17,2%
6	Mobile Banking	12,0%
7	Bancassurance	3,3%
8	Agen LJK	16,5%

Tabel 5.4.2 Penggunaan Delivery Channel

No	Delivery Channel	Penggunaan Delivery Channel
(1)	(2)	(3)
1	Kantor LJK	86,6%
2	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	73,5%
3	Electronic Data Capture (EDC)	1,0%
4	Online Transaction	4,4%
5	Phone Banking	5,1%
6	Mobile Banking	4,6%
7	Bancassurance	0,4%
8	Agen LJK	5,5%

Tabel 5.4.3 Penggunaan Delivery Channel Berdasarkan Produk dan Layanan Jasa Keuangan

No	Delivery Channel	Perbankan	Perasuransian	Dana Pensiun	Pergadaian	Pembiayaan	Pasar Modal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kantor LJK	94,1%	89,2%	94,5%	94,5%	75,4%	50,0%
2	ATM	86,4%	0,0%	17,9%	17,9%	29,0%	0,0%
3	EDC	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%
4	Online Transaction	5,1%	0,0%	0,1%	0,1%	1,0%	25,0%
5	Phone Banking	5,9%	0,0%	0,1%	0,1%	1,0%	12,5%
6	Mobile Banking	5,2%	0,0%	0,1%	0,1%	1,3%	12,5%
7	Bancassurance	0,2%	2,5%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%
8	Agen LJK	1,1%	18,8%	1,0%	1,0%	20,8%	37,5%

Tabel 5.4.4 Frekuensi Penggunaan *Delivery Channel*

No	Delivery Channel	Rata-rata Penggunaan <i>Delivery Channel</i> per Bulan
(1)	(2)	(3)
1	Kantor LJK	1,5
2	<i>Anjungan Tunai Mandiri (ATM)</i>	2,7
3	<i>Electronic Data Capture (EDC)</i>	1,7
4	<i>Online Transaction</i>	2,0
5	<i>Phone Banking</i>	2,3
6	<i>Mobile Banking</i>	2,5
7	<i>Bancassurance</i>	1,0
8	Agen LJK	1,6

BAB VI

PERTANYAAN PENDUKUNG (OECD)

PERTANYAAN PENDUKUNG (OECD)

BAB VI

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2016 (SNLIK 2016) disusun atas pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada survei yang diselenggarakan oleh lembaga internasional seperti World Bank dan OECD. Bab ini secara khusus akan menjabarkan hasil survei yang pertanyaannya diacu dari Survei OECD yang berjudul “2015 OECD/INFE Toolkit for Measuring Financial Literacy and Financial Inclusion”. Pertanyaan survei tersebut ditanyakan pada 1.000 responden yang terpilih dari 9.680 responden total SNLIK 2016 dan tersebar di 34 provinsi. Dengan demikian, 1.000 responden dimaksud mendapatkan pertanyaan lebih banyak dibandingkan dengan 8.680 responden lainnya.

Adapun hasil survei yang dijabarkan pada bab ini lebih banyak terkait dengan literasi keuangan dan bukan merupakan pertanyaan penentu indeks literasi keuangan. Secara umum, hasil survei yang berasal dari pertanyaan OECD tersebut adalah pertanyaan terkait dengan sikap dan perilaku keuangan. Data pendukung mengenai sikap dan perilaku keuangan dapat dijadikan sebagai acuan untuk memetakan sikap dan perilaku keuangan masyarakat.

Tabel 6.1 Kegiatan Menabung dalam 1 Tahun Terakhir

No	Jenis Kegiatan Menabung	%
(1)	(2)	(3)
1	Menyimpan di rumah atau di dompet	23,2%
2	Meletakkan uang di bank dan hanya bergantung pada bunga	10,3%
3	Menyimpan uang pada akun tabungan	71,7%
4	Menyimpan uang pada keluarga	1,9%
5	Menyimpan uang di lembaga keuangan informal	1,5%
6	Menginvestasikan dana selain dana pensiun	0,4%
7	Lainnya seperti membeli ternak, emas dan properti	1,0%

Tabel 6.2 Media Pembayaran yang Paling Sering Digunakan

No	Media	%
(1)	(2)	(3)
1	Melalui Rekening Bank	38,2%
2	Melalui Rekening Ponsel	0,7%
3	Menerima secara Tunai	89,1%

Tabel 6.3 Kemampuan Menghitung (tambahan)

No	Keterampilan	%
(1)	(2)	(3)
1	<p>Pemahaman Konsep Bunga I</p> <p>“Jika anda menabung sebesar Rp100.000, dengan suku bunga 2% per tahun, berapa jumlah tabungan anda di akhir tahun kelima? (dengan asumsi anda tidak melakukan penyetoran atau penarikan uang)”</p>	3,6%
2	<p>Pemahaman Konsep Bunga II</p> <p>“Jika hari ini anda meminjamkan uang kepada teman anda sebesar Rp25.000 dan teman anda mengembalikan uang anda sebesar Rp25.000 esok harinya, seberapa besar bunga yang dibayarkan teman anda atas pinjaman yang anda berikan?”</p>	76,0%
3	<p>Pemahaman Konsep Investasi I</p> <p>“Inflasi yang tinggi berarti biaya hidup meningkat.”</p>	66,5%
4	<p>Pemahaman Konsep Investasi II</p> <p>“Berinvestasi di saham dengan membeli saham dari berbagai perusahaan akan mengurangi risiko investasi (dibandingkan dengan membeli saham 1 perusahaan saja)”</p>	47,8%

Tabel 6.4 Pemahaman Keuangan

No	Pernyataan	Ya
(1)	(2)	(3)
1	Percaya bahwa investasi yang memberikan keuntungan besar cenderung memiliki risiko yang tinggi	62,6%
2	Inflasi yang tinggi berarti biaya hidup meningkat	66,5%
3	Berinvestasi di saham dengan membeli saham dari berbagai perusahaan akan mengurangi risiko investasi (dibandingkan dengan membeli saham 1 perusahaan saja)	47,8%

Tabel 6.5 Pernyataan yang paling menunjukkan Cara Pengambilan Keputusan

No	Pernyataan	%
(1)	(2)	(3)
1	Mempertimbangkan pilihan dari beberapa LJK	65,8%
2	Mempertimbangkan pilihan dari 1 LJK	21,6%
3	Tidak melakukan pertimbangan	2,4%
4	Telah berusaha mencari informasi namun tidak menemukan pilihan yang tepat	1,5%

Tabel 6.6 Pengalaman dalam 2 Tahun Terakhir

No	Jenis Kejadian	%
(1)	(2)	(3)
1	Menerima tawaran investasi ilegal	11,9%
2	Secara tidak sengaja menyebarkan data/informasi pribadi	10,0%
3	Menjadi korban penyalahgunaan kartu debit/kredit	3,7%

Tabel 6.7 Mengambil Keputusan Keuangan Sehari-hari

No	Subjek	%
(1)	(2)	(3)
1	Diri sendiri	75,3%
2	Bersama orang lain	23,2%
3	Orang lain	1,0%

Tabel 6.8 Pengalaman terkait Ketahanan Keuangan

No	Kejadian	%
(1)	(2)	(3)
1	Pernah mengalami pengeluaran besar (setara dengan penghasilan sebulan) dan mengatasinya tanpa mendapatkan bantuan (meminjam)	44,8%
2	Yakin terhadap kemampuan merencanakan keuangan setelah masa pensiun	31,1%

Tabel 6.9 Jangka Waktu Ketahanan Keuangan

No	Jangka Waktu	Ketahanan Keuangan apabila Kehilangan Sumber Pendapatan Utama (tanpa meminjam uang atau pindah rumah)
(1)	(2)	(3)
1	Kurang dari seminggu	6,2%
2	Antara 1 minggu - 1 bulan	32,2%
3	Antara 1 bulan - 3 bulan	33,7%
4	Antara 3 bulan - 6 bulan	9,2%
5	Lebih dari 6 bulan	4,4%

Tabel 6.10 Pernyataan Sikap Keuangan

No	Sikap Keuangan	%
(1)	(2)	(3)
1	Sebelum saya membeli sesuatu, saya mempertimbangkan dengan hati-hati apakah saya dapat membeli sesuatu tersebut	63,1%
2	Saya lebih fokus pada hari ini daripada besok	34,8%
3	Saya merasa lebih senang menghabiskan uang daripada menyimpannya dalam waktu yang lama	10,4%
4	Saya membayar utang saya tepat waktu	61,7%
5	Saya siap menanggung risiko kehilangan uang ketika menabung atau berinvestasi	28,4%
6	Saya berusaha mengamati urusan keuangan saya secara pribadi	64,5%
7	Saya menetapkan rencana keuangan jangka panjang dan berusaha mencapainya	65,7%
8	Uang ada untuk dihabiskan	9,8%
9	Kondisi keuangan saya membatasi kemampuan saya untuk melakukan sesuatu yang penting	19,1%
10	Saya cenderung khawatir dengan pemenuhan kebutuhan hidup saya	15,1%
11	Saya memiliki terlalu banyak utang saat ini	4,5%
12	Saya puas dengan keadaan keuangan saya saat ini	35%



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

(021) 19600 000 | 1500 655



Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

www.ojk.go.id | konsumen@ojk.go.id | sikapiuangmu.ojk.go.id